

**ANALISIS TINGKAT EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN DAN  
DESENTRALISASI KEUANGAN DAERAH MENURUT  
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

(Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun 2008-2017)



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Ekonomi**

Oleh:

**Riri Septyaningrum Putri**

**NPM. 1451010101**

**Jurusan : Ekonomi Syariah**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
2018/1439 H**

**ANALISIS TINGKAT EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN DAN  
DESENTRALISASI KEUANGAN DAERAH MENURUT  
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

(Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun 2008-2017)

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Ekonomi**



**Pembimbing I : Any Eliza.,S.E.,M.Ak**

**Pembimbing II : Deki Fermansyah,SE.,M.Si**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
2018/1439 H**

## ABSTRAK

Otonomi daerah adalah hak untuk wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara kesatuan republik Indonesia. Konsekuensi dari penerapan otonomi daerah yaitu setiap daerah dituntut untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) guna membiayai urusan rumah tangganya sendiri. Salah satunya adalah Kota Bandar Lampung. Kota Bandar Lampung merupakan kota yang menduduki posisi pertama di Provinsi Lampung sebagai kota yang mendapatkan PAD yang besar akan tetapi peningkatan jumlah PAD di kota bandar lampung diikuti dengan jumlah dana berimbang yang selalu meningkat juga. Dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah perlu dilakukan analisis rasio keuangan untuk menilai kinerja Pemerintahan Daerah yaitu analisis rasio efektivitas, rasio kemandirian dan rasio desentralisasi fiskal serta *trend* masing-masing rasio.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kinerja keuangan daerah Kota Bandar Lampung berdasarkan rasio efektivitas, kemandirian dan desentralisasi fiskal keuangan daerah pada tahun 2008-2017 serta bagaimana pandangan Ekonomi Islam tentang kinerja keuangan daerah Kota Bandar Lampung tahun 2008-2017. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan Kota Bandar Lampung berdasarkan rasio efektivitas, kemandirian dan desentralisasi fiskal pada tahun 2008-2017 serta untuk mengetahui pandangan Ekonomi Islam tentang kinerja keuangan daerah Kota Bandar Lampung tahun 2008-2017.

Jenis dan sumber data menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder dalam periode tahun 2008-2017. Variabel dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan yang diukur dengan menggunakan parameter berupa rasio efektivitas, rasio kemandirian, dan rasio desentralisasi serta *trend* setiap masing-masing rasio. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis rasio untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah. Populasi dalam penelitian ini adalah data APBD Kota Bandar Lampung setiap tahunnya. Sampel dalam penelitian ini adalah data APBD Kota Bandar Lampung pada 10 tahun terakhir yaitu tahun 2008-2017.

Hasil penelitian menunjukkan: 1) Rasio efektivitas keuangan daerah secara rata-rata berada pada 90,495% dengan kategori efektif dengan *trend* efektivitas keuangan daerah berada pada 70,814% selama periode tahun 2008-2017. 2) Rasio kemandirian keuangan daerah secara rata-rata berada pada 27,966% dikategorikan rendah dengan *trend* kemandirian keuangan daerah berada pada 262,429% selama periode tahun 2008-2017. 3) Rasio desentralisasi fiskal keuangan daerah secara rata-rata berada pada 17,85% dengan kategori kurang baik dengan *trend* desentralisasi fiskal keuangan daerah berada pada 197,237% selama periode tahun 2008-2017. Kinerja keuangan pemerintah Kota Bandar Lampung tahun 2008-2017 telah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam tetapi belum maksimal bila dilihat dari hasil perhitungan kinerja keuangan daerah.

**Kata Kunci :** Kinerja Keuangan Daerah, Efektivitas Keuangan Daerah, Kemandirian Keuangan Daerah dan Desentralisasi Keuangan Daerah



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

*Sekretariat : Jl, Letkol. H. Endero Suratmin, Sukarame-Bandar Lampung, 35131 Tlp. 0721-703260*

**PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : **ANALISIS TINGKAT EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN, DAN  
DESENTRALISASI KEUANGAN DAERAH MENURUT  
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Pada Pemerintah  
Kota Bandar Lampung Tahun 2008-2017)**

Nama : **Riri Septyaningrum Putri**  
NPM : **1451010101**  
Jurusan : **Ekonomi Syari'ah**  
Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis Islam**

**DISETUJUI**

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosyah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Any Eliza, S.E., M.Ak**  
**NIP.198308152006042004**

**Pembimbing II**

**Deki Fermansyah, SE., M.Si**  
**NIP.198706042015031006**

**Ketua Jurusan**

**Madnasir, S.E., M.Si**  
**NIP. 197504242002121001**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN**

**Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame-Bandar Lampung. Telp (0721) 702360**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul “ **ASAL-USUL MANUSIA MENURUT TEORI CHARLES DARWIN PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM ( Studi Buku Teks Mata Pelajaran Sejarah Madrasah Tsanawiyah )**, disusun oleh Nama : **Rizantama Ade Nugraha NPM. 1411010187, Jurusan Pendidikan Agama Islam**, telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Tarbiyah, pada :

Hari/Tanggal : Rabu / 06 Juni 2018

Pukul : 08.00-10.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Jurusan PAI

**TIM MUNAQASYAH**

Ketua : Dr. Imam Syafe'i, M.Ag

Sekretaris : Waluyo Erry Wahyudi, M.Pd.I

Penguji Utama : Dr. Rijal Firdaos, M.Pd

Penguji PD I : Dr. Zulhanan, M.A

Penguji PD II : Andi Thahir, S.Psi., M.A., ED.D

Menyetujui/Mengesahkan

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Dekan,

**Prof. Dr. H. Chairul Anwar, M.Pd**

**NIP. 195608101987031001**





## MOTTO

وَلِكُلِّ دَرَجَةٌ مِّمَّا عَمِلُوا<sup>١</sup> وَلِيُوفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٩﴾

*Artinya: “dan bagi masing-masing derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerja-pekerja mereka sedang mereka tiada dirugikan.”<sup>1</sup>*

( Qs. Al-Ahqaaf ayat 19 )



---

<sup>1</sup> Al-Qur'an (Bandung: INDOTAMA GRAFIKA, 2014), h.402

## PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT karena atas izin dan ridho-Nya yang telah memudahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, penulisan skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku, ayah dan mama (Drs. Syamsi Thamrin dan Nur Ahsanty, S.Sos) yang sangat aku hormati dan aku banggakan. Selalu menguatkan aku dengan sepenuh jiwa raga, merawatku, memotivasiku dengan nasehat-nasehat yang luar biasa, dan mendoakanku agar selalu ada dalam jalan-Nya. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT dan keberkahan dalam setiap langkahnya.
2. Ketiga adikku, Fadillah Rohimahastuti, Trindari Aprini Putri, dan Ragilya Mayni Putri yang senantiasa selalu mendoakanku, nenekku tercinta Nur Tjahjawati yang senantiasa menasehatiku, serta keluarga besar kakekku Prof. Dr. H. Musa Sueb, M.A (Alm). Berkat doa dan dukungan baik moril maupun materil kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
3. Almamaterku tercinta tempatku menimba ilmu UIN Raden Intan Lampung. Semoga semakin jaya, maju dan berkualitas.
4. Sahabat seperjuanganku EI E terima kasih telah berjuang dan berproses bersama-sama serta teman-teman Ekonomi Islam angkatan 2014 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung, semoga kita menjadi alumni yang bermanfaat dan senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai Islam.

## RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Riri Septyaningrum Putri, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 01 September 1996, anak pertama dari empat bersaudara dari pasangan Drs. Syamsi Thamrin dan Nur Ahsanty, S.Sos

Adapun riwayat pendidikan penulis dimulai dari SDN 2 palapa pada tahun 2002 dan lulus pada tahun 2008, MTSN 1 Tanjung Karang pada tahun 2008 dan lulus pada tahun 2011, MAN 2 Bandar Lampung pada tahun 2011 dan lulus pada tahun 2014.

Penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Ekonomi Syariah, di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung melalui Seleksi Prestasi Akademik Nasional-Perguruan Tinggi Keislaman Negeri (SPAN-PTKIN) pada tahun 2014.



Bandar Lampung, 25 Mei 2018

Yang Membuat,

Riri Septyaningrum Putri



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk sehingga skripsi dengan judul “Analisis Tingkat Efektivitas, Kemandirian, dan Desentralisasi Keuangan Daerah Menurut Perspektif Islam (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun 2008-2017)” dapat diselesaikan. Shalawat serta salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan pengikut-pengikutnya yang setia.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung, tak lupa dihaturkan terimakasih sealam-dalamnya. Secara rinci ungkapan terimakasih itu disampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.  
Yang selalu memotivasi mahasiswa untuk menjadi pribadi yang berkualitas dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islami.
2. Dr. Moh. Bahrudin, M.A selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa. Serta pimpinan dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah membantu dalam memberikan informasi data, referensi, dll.

3. Any Eliza.,S.E.,M.Ak dan Deki Fermansyah,SE.,M.Si selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah mengarahkan penulis hingga penulisan ini selesai.
4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu dan bimbingan kepada penulis selama menempuh studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung. Pimpinan dan karyawan perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Universitas yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain.
5. Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah dan Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung yang telah membantu penulis dalam mengumpulkan data-data penelitian.
6. Sahabatku Zakiyyah Ulfah yang selalu memberi semangat dan nasehat yang luar biasa kepada penulis.
7. Teman-teman jurusan Ekonomi Islam UIN Raden Intan Lampung angkatan 2014 dan teman-teman lainnya yang telah membantu dan memotivasi penulis agar penulisan skripsi ini cepat diselesaikan.

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. Hal itu tidak lain disebabkan keterbatasan waktu, dana kemampuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu kepada para pembaca kiranya dapat memberikan masukan dan saran guna melengkapi hasil penelitian ini.

Peneliti berharap hasil penelitian ini akan menjadi sumbangan yang berarti dalam mengembangkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, 25 Mei 2018

Penulis

Riri Septyaningrum Putri





## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xviii</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	3
C. Latar Belakang Masalah.....	4
D. Identifikasi Masalah .....	12
E. Batasan Masalah .....	12
F. Rumusan Masalah.....	12
G. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	13

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Otonomi Daerah	
1. Pengertian Otonomi Daerah .....	15
2. Dasar Hukum Pelaksanaan Otonomi Daerah .....	16
3. Prinsip Pelaksanaan Otonomi Daerah .....	17
4. Ciri Utama Keberhasilan Pelaksanaan Daerah Otonom .....	18

B. Keuangan Daerah	
1. Pengertian Keuangan Daerah.....	19
2. Pengelolaan Keuangan Daerah .....	20
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	
a. Pengertian APBD .....	21
b. Struktur APBD	
1) Pendapatan Daerah.....	22
a) Pendapatan Asli Daerah .....	22
(1) Pajak Daerah .....	23
(2) Retribusi Daerah.....	23
(3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan ...	23
(4) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah .....	23
b) Dana Berimbang.....	24
(1) Dana Bagi Hasil .....	24
(2) Dana Alokasi Umum.....	24
(3) Dana Alokasi Khusus.....	25
c) Lain-Lain Pendapatan Yang Sah.....	25
2) Belanja Daerah.....	25
3) Pembiayaan Daerah.....	25
C. Kinerja Keuangan Daerah	
1. Pengertian Kinerja Keuangan Daerah.....	26
2. Pengukuran Kinerja	
a. Penetapan Indikator Kinerja.....	27
b. Penetapan Pencapaian Kinerja .....	29
c. Formulir Pengukuran Kinerja .....	29
3. Tujuan dan Manfaat Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah	
a. Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah.....	30
b. Manfaat Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah.....	30
4. Analisis Kinerja Keuangan Daerah	
a. Rasio Efektivitas Keuangan Daerah.....	31

b. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah .....	34
c. Rasio Desentralisasi Keuangan Daerah .....	37
5. Pandangan Ekonomi Islam Tentang Kinerja Keuangan Daerah.....	38
D. Tinjauan Pustaka .....	43
E. Kerangka Pemikiran.....	46

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis dan Sifat Penelitian	
1. Jenis Penelitian.....	49
2. Sifat Penelitian .....	49
B. Jenis dan Sumber Data .....	50
C. Metode Pengumpulan Data	
1. Metode Dokumentasi .....	50
2. Metode Wawancara.....	51
3. Metode Studi Pustaka.....	51
D. Populasi dan Sampel .....	51
E. Definisi Operasional Variabel.....	52
F. Analisis Data .....	54

### **BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil Penelitian	
1. Gambaran Umum Objek Penelitian	
a. Sejarah Kota Bandar Lampung .....	60
b. Keresidenan Menjadi Provinsi .....	64
c. Hari Jadi Kota Bandar Lampung.....	66
d. Geografi Kota Bandar Lampung .....	67
e. Topografi Kota Bandar Lampung .....	68
f. Kondisi Demografi Kota Bandar Lampung .....	69
g. Perekonomian Kota Bandar Lampung .....	70
h. Visi dan Misi	



1) Visi .....	71
2) Misi .....	71
<b>B. Analisis Data</b>	
1. Analisis Deskriptif .....	72
2. Analisis Rasio	
a. Rasio Efektivitas Keuangan Daerah.....	73
b. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.....	75
c. Rasio Desentralisasi Fiskal Keuangan Daerah.....	77
<b>C. Pembahasan</b>	
1. Kinerja Keuangan Daerah Kota Bandar Lampung Berdasarkan Rasio Efektivitas Keuangan Daerah .....	80
2. Kinerja Keuangan Daerah Kota Bandar Lampung Berdasarkan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah .....	86
3. Kinerja Keuangan Daerah Kota Bandar Lampung Berdasarkan Rasio Desentralisasi Keuangan Daerah .....	93
4. Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Bandar Lampung Menurut Perspektif Ekonomi Islam.....	97
 <b>BAB V KESIMPULAN DAN PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	102
B. Saran.....	104

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung Tahun 2008-2016 .....	6
1.2 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2008-2017 .....	7
1.3 Target Dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2008-2017 .....	8
1.4 Dana Berimbang Kota Bandar Lampung Tahun 2008-2017 .....	9
2.1 Kriteria Tingkat Efektivitas Keuangan Daerah.....	32
2.2 Pola Hubungan Dan Kriteria Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.....	35
2.3 Kriteria Tingkat Desentralisasi Fiskal Keuangan Daerah.....	37
2.4 Ringkasan Tinjauan Pustaka .....	43
3.1 Definisi Operasional Variabel.....	53
3.2 Kriteria Tingkat Efektivitas Keuangan Daerah.....	56
3.3 Pola Hubungan Dan Kriteria Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.....	57
3.4 Kriteria Tingkat Desentralisasi Fiskal Keuangan Daerah.....	58
4.1 Jumlah Penduduk Kota Bandar Lampung Perkecamatan Pada Tahun 2016.....	70
4.2 Rasio Efektivitas Keuangan Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2008-2017 .....	73
4.3 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2008-2017 .....	76
4.4 Rasio Desentralisasi Fiskal Keuangan Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2008-2017 .....	78

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Kerangka Pemikiran.....	48
4.1 Rasio Efektivitas dan <i>Trend</i> Efektivitas.....	74
4.2 Rasio Kemandirian dan <i>Trend</i> Kemandirian.....	77
4.3 Rasio Desentralisasi Fiskal dan <i>Trend</i> Desentralisasi Fiskal.....	79





## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Sk Pembimbing
- Lampiran 2 : Kartu Konsultasi
- Lampiran 3 : Surat Pengantar Riset Dari Kesatuan Bangsa Dan Politik  
(Kesbangpol)
- Lampiran 4 : Surat Izin Riset
- Lampiran 5 : Hasil Perhitungan Rasio-Rasio Kinerja Keuangan Daerah Kota  
Bandar Lampung



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Penegasan Judul**

Untuk memudahkan dan mencegah adanya kesalah pahaman terhadap pemaknaan judul maka di perlukan adanya uraian terhadap arti dari kata yang dimaksudkan dalam penulisan skripsi. Dengan adanya uraian tersebut diharapkan tidak terjadi kesalah pahaman terhadap pemaknaan judul dan juga diharapkan akan memperoleh gambaran yang jelas dari makna yang dimaksud.

Adapun judul skripsi ini adalah **“ANALISIS TINGKAT EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN DAN DESENTRALISASI KEUANGAN DAERAH MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi kasus pada Pemerintah Kota Bandar Lampung tahun 2008-2017)”**.

Adapun uraian pengertian dan istilah-istilah judul terasebut sebagai berikut:

1. **Analisis** merupakan aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditafsir maknanya.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Makinuddin Dan Tri Hadiyanto Sasongko, *Analisis Social*, (Bandung: AKATIGA, 2006), h.40

2. **Efektivitas Keuangan Daerah** merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.<sup>3</sup>
3. **Kemandirian Keuangan Daerah** merupakan pemerintah dapat melakukan pembiayaan dan pertanggung jawaban keuangan sendiri, melaksanakan sendiri dalam rangka asas desentralisasi.<sup>4</sup>
4. **Desentralisasi Fiskal** merupakan kewenangan atau tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menggali dan mengelola pendapatan.<sup>5</sup>
5. **Perspektif** merupakan sudut pandang.<sup>6</sup>
6. **Ekonomi Islam** merupakan kumpulan dasar-dasar umum tentang ekonomi yang digali dari Al-Qur'an al-karim dan as-Sunnah.<sup>7</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diperjelas kembali bahwa yang dimaksud dalam pembahasan skripsi ini adalah menganalisis suatu peristiwa untuk mengetahui tingkat efektivitas, kemandirian dan desentralisasi keuangan daerah menurut perspektif Ekonomi Islam (Studi kasus pada Pemerintah Kota Bandar Lampung tahun 2008-2017).

---

<sup>3</sup> Novelya South, Jantje Tinangon, Dan Sintje Rondonuwu, "Pengukuran Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Dinas Pengelola Keuangan, Pendapatan Dan Asset (DPKPA) Kabupaten Minahasa Selatan", *Jurnal EMBA* , Vol.4 No.1 (Maret 2016), h. 613-622

<sup>4</sup> Abdul Halim, *Manajemen Keuangan Daerah*, (Yogyakarta: UPP-AMP YKPN, 2001) h.167

<sup>5</sup> Andri Haryanto, Skripsi: "*Analisis Efektivitas, Kemandirian Dan Desentralisasi Pemerintah Kota Medan*", (Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2014), h. 22

<sup>6</sup> Pengertian Perspektif (On-Line) Tersedia di : [Http://Kbbi.Web.Id](http://Kbbi.Web.Id) (19 Maret 2017)

<sup>7</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 2

## **B. Alasan Memilih Judul**

Adapun alasan memilih judul analisis tingkat efektivitas, kemandirian dan desentralisasi keuangan daerah menurut perspektif Ekonomi Islam (Studi kasus pada Pemerintah Kota Bandar Lampung tahun 2008-2017) yaitu sebagai berikut:

### **1. Secara Objektif**

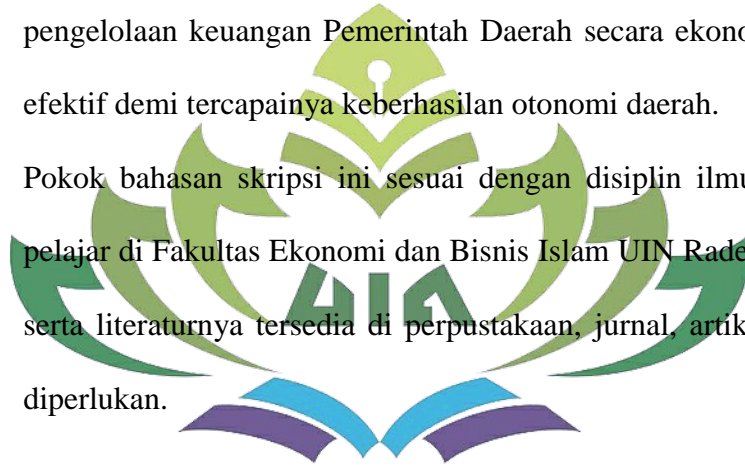
Salah satu faktor yang mempengaruhi proses penyelenggaraan pemerintah daerah adalah dari segi faktor keuangan. Sebagaimana kita ketahui bahwa Kota Bandar Lampung merupakan Ibukota di Provinsi Lampung dan salah satu kota yang memiliki pendapatan yang selalu meningkat dibandingkan kota atau kabupaten lain yang ada di Provinsi Lampung. Kota Bandar Lampung menduduki posisi pertama di Provinsi Lampung sebagai kota yang mendapatkan PAD yang besar dibandingkan kabupaten/ kota yang ada di Provinsi Lampung seperti pada tahun 2012 sebesar 300.696 Milyar menjadi 421.420 Milyar pada tahun 2014.

Alasannya peningkatan pendapatan asli daerah Kota Bandar Lampung selalu diikuti dengan jumlah dana berimbang yang selalu meningkat seperti pada tahun 2016 dana berimbang sebesar Rp. 1.376.175 Milyar lebih besar daripada pendapatan asli daerah sebesar Rp. 483.379 Milyar sedangkan daerah otonom harus seminim mungkin ketergantungan pada bantuan pemerintah pusat dan pendapatan asli daerah harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar.



## 2. Secara Subjektif

- a. Memberikan pengetahuan bagi penulis dan pembaca tentang tingkat efektivitas, kemandirian dan desentralisasi keuangan daerah menurut perspektif Ekonomi Islam (Studi kasus pada pemerintah Kota Bandar Lampung tahun 2008-2017). Selain itu juga memberikan wawasan bagi pemerintah sebagai tambahan bahan referensi dalam menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah dan alternatif masukan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah secara ekonomis, efisien, dan efektif demi tercapainya keberhasilan otonomi daerah.
- b. Pokok bahasan skripsi ini sesuai dengan disiplin ilmu yang penyusun pelajari di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung serta literaturnya tersedia di perpustakaan, jurnal, artikel dan data yang diperlukan.



## C. Latar Belakang

Era reformasi saat ini memberikan peluang bagi perubahan paradigma pembangunan nasional dari paradigma pertumbuhan menuju paradigma pemerataan pembangunan secara lebih adil dan berimbang.<sup>8</sup> Menurut UU nomor 32 tahun 2004 yang telah di revisi dengan UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, otonomi daerah adalah hak untuk wewenang dan kewajiban

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Pajak Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah (On-Line) tersedia di: [www.Djpk.Kemenkeu.Go.Id](http://www.Djpk.Kemenkeu.Go.Id) (3 Januari 2018).

daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun misi utama UU nomor 33 tahun 2004 adalah bukan hanya untuk melimpahkan kewenangan pembangunan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah tetapi yang lebih penting adalah efisiensi dan efektivitas sumber daya keuangan.<sup>9</sup>

Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerahnya. Artinya daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, sedangkan ketergantungan pada bantuan pemerintah pusat harus seminimal mungkin, sehingga PAD harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan pembagian keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar system pemerintahan Negara. Konsekuensi dari penerapan otonomi daerah yaitu setiap daerah dituntut untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) guna membiayai urusan rumah tangganya sendiri.<sup>10</sup>

APBD merupakan pengelolaan keuangan daerah dalam tahun anggaran tertentu. Semua pengeluaran dan penerimaan daerah dicatat dan dikelola dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Berdasarkan penerapan otonomi daerah maka pemerintah daerah yang menentukan Anggaran tersebut,

---

<sup>9</sup> Bisma, I Dewa Gde, Dan Susanto, H. "Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003-2007". *Jurnal Ganec Swara*. Edisi Khusus, Vol 4 No. 3 (2010), h. 75-86.

<sup>10</sup> Aswarodi, 2004. Analisis Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah Sebelum Dan Setelah Pemberlakuan Undang -Undang No. 25 Tahun 1999 Di Kabupaten Lampung Selatan; Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah. UPP AMP YKPN, Yogyakarta.

sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah serta arah pembangunan daerah tersebut. Dengan dikelolanya APBD oleh pemerintah daerah masing-masing tanpa ada campur tangan pemerintah pusat dalam rangka perwujudan otonomi daerah atau desentralisasi fiskal.<sup>11</sup>

Berikut ini adalah Pendapatan Asli Daerah di kabupaten atau kota di Provinsi Lampung:

**Tabel 1.1**  
**Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung**  
**Tahun 2008-2016**

(Dalam Miliar)

Kabupaten/ Kota	Tahun								
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Bandar Lampung	67.661	70.432	86.692	162.818	298.696	360.968	394.646	397.547	483.379
Metro	19.980	21.060	27.345	42.002	48.377	59.224	97.307	127.586	113.989
Lampung Barat	17.198	11.579	16.302	21.562	25.278	33.829	40.800	46.434	49.078
Tanggamus	15.314	-	11.663	26.258	18.672	22.017	22.488	21.979	23.712
Lampung Selatan	25.572	25.030	40.749	68.652	80.459	100.050	130.597	161.645	184.063
Lampung Timur	26.645	18.821	20.669	31.844	49.824	40.761	83.131	84.496	94.924
Lampung Tengah	22.837	24.471	37.086	50.591	101.060	81.780	108.180	116.343	137.871
Lampung Utara	16.531	11.794	13.499	28.762	21.351	46.626	80.918	93.239	98.607
Way Kanan	14.476	11.481	8.745	9.472	10.148	24.831	45.811	47.882	44.346
Tulang Bawang	10.437	11.396	44.498	19.980	23.152	36.242	24.444	34.008	26.416
Pesawaran	2.825	4.542	13.229	178.916	25.710	25.933	36.482	37.060	41.956
Pringsewu	-	-	5.809	19.347	29.090	30.421	63.339	61.765	68.157
Mesuji	-	-	1.398	5.392	8.269	10.021	20.901	18.713	27.783
Tulang Bawang Barat	-	-	2.214	4.298	5.840	10.345	15.436	16.452	20.882
Pesisir Barat	-	-	-	-	-	-	10.373	11.597	20.710

*Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung Tahun 2018*

<sup>11</sup> Rahardjo Adisasmita, *Pembiayaan Pembangunan Daerah*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011), h. 41-43

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa kabupaten/kota di Provinsi Lampung yang pendapatan asli daerahnya selalu mengalami peningkatan adalah Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Tulang Bawang Barat, dan Kabupaten Pesisir Barat. Kota Bandar Lampung menduduki posisi pertama dengan pendapatan asli daerah sebesar 397.547 Miliar pada tahun 2015 menjadi 483.379 Miliar pada tahun 2016. Kota Bandar Lampung yang memiliki objek pajak yang cukup banyak, sudah seharusnya mengoptimalkan penerimaan pajak daerah sebagai sumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berikut ini penerimaan PAD Kota Bandar Lampung dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.2**  
**Realisasi Pendapatan Asli Daerah**  
**Kota Bandar Lampung Tahun 2008-2017**

(Dalam rupiah)

Tahun	Pendapatan Asli Daerah				Total PAD
	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	Lain-Lain PAD yang sah	
2008	42.841.374.000,88	14.414.767.000,72	2.509.146.019,89	7.896.232.000,43	67.661.519.021,92
2009	47.035.294.000,28	15.849.094.000,53	3.087.054.001,42	4.460.818.000,96	70.432.260.003,19
2010	56.627.114.000,79	21.911.781.000,74	3.449.401.698,05	4.704.103.000,83	86.692.399.700,41
2011	112.557.355.470,00	38.431.095.234,00	5.631.089.632,00	6.198.579.220,88	162.818.119.556,88
2012	183.436.575.291,26	68.252.030.150,00	6.862.738.923,00	40.144.717.721,23	298.696.062.085,49
2013	242.651.752.332,18	50.651.293.897,32	8.237.246.269,54	59.158.057.632,84	360.698.350.131,88
2014	246.167.925.212,95	45.920.496.941,00	13.206.503.301,24	89.351.963.991,40	394.646.889.446,59
2015	258.454.662.346,00	46.682.837.194,00	11.249.897.883,27	81.159.929.433,12	397.547.326.856,39
2016	324.667.322.496,99	49.653.325.819,00	10.886.472.354,14	98.172.277.364,71	483.379.398.034,84
2017	351.869.360.000,00	85.694.131.500,00	16.520.736.873,35	158.725.452.250,52	612.809.680.623,87

*Sumber: Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2018*

Berdasarkan tabel 1.2 dapat dilihat Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Bandar Lampung mengalami peningkatan selama 10 tahun terakhir. Pada pajak daerah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada retribusi daerah sempat

mengalami penurunan pada tahun 2012 sebesar Rp.68.252.030.150,00 ke tahun 2013 sebesar Rp.50.651.293.897,32 dan turun lagi pada tahun 2014 sebesar Rp.45.920.496.941,00. Pada Hasil kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sempat mengalami penurunan pada tahun 2014 sebesar Rp. 13.206.503.301,24 ke tahun 2015 sebesar Rp. 11.249.897.883,27. Pada Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah juga sempat mengalami penurunan pada tahun 2008 sebesar Rp.7.896.232.000,43 ke tahun 2009 sebesar Rp.4.460.818.000,96 dan pada tahun 2014 sebesar Rp.89.351.963.991,40 ke tahun 2015 sebesar Rp.81.159.929.433,12.

**Tabel 1.3**  
**Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah**  
**Kota Bandar Lampung Tahun 2008-2017**

<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>
2008	60.422.775.028,70	67.661.519.021,92
2009	72.009.309.841,70	70.432.260.003,19
2010	75.031.991.782,16	86.692.399.700,41
2011	156.796.491.183,50	162.818.119.556,88
2012	292.272.049.972,25	298.696.062.085,49
2013	418.111.740.815,52	360.698.350.131,88
2014	495.200.463.391,26	394.646.889.446,59
2015	769.108.142.606,24	397.547.326.856,39
2016	757.745.187.987,05	483.379.398.034,84
2017	994.795.696.600,00	612.809.680.623,87

**Sumber: Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2018**

Berdasarkan target di atas bahwa realisasi pendapatan tahun 2008 sudah mencapai target yang sudah ditentukan tetapi pada tahun 2009 realisasi pendapatan di Kota Bandar Lampung belum mencapai target. Pada tahun 2010 sampai 2012 sudah mencapai target tetapi pada tahun 2013 sampai 2017 belum



mencapai target yang telah ditentukan sehingga terjadi defisit realisasi penerimaan dalam pengelolaan PAD tahun anggaran 2008-2017. Walaupun demikian, Realisasi pendapatan selalu meningkat dari tahun 2008-2017, Tetapi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung selalu diikuti dengan jumlah Dana Perimbangan yang selalu meningkat. Dana berimbang merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah.<sup>12</sup> Berikut ini adalah dana Berimbang kota Bandar Lampung:

**Tabel 1.4**  
**Dana Berimbang**  
**Kota Bandar Lampung Tahun 2008-2017**

<b>Tahun</b>	<b>PAD</b>	<b>Dana Berimbang</b>	<b>Lain-lain PAD yang sah</b>
2008	67.661.519.021,92	634.760.315.000,46	7.896.232.000,43
2009	70.432.26.0003,19	659.733.381.000,20	4.460.818.000,96
2010	86.692.399.700,41	672.078.484.000,49	4.704.103.000,83
2011	162.818.119.556,88	747.009.425.171,00	6.198.579.220,88
2012	298.696.062.085,49	901.841.182.094,00	40.144.717.721,23
2013	360.698.350.131,88	992.894.943.895,00	59.158.057.632,84
2014	394.646.889.446,59	1.039.433.426.630,00	89.351.963.991,40
2015	397.547.326.856,39	1.016.422.749.268,00	81.159.929.433,12
2016	483.379.398.034,84	1.376.175.794.387,00	98.172.277.364,71
2017	612.809.680.623,87	1.456.610.360.061,45	197.725.452.250,52

**Sumber : Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2018**

Berdasarkan tabel 1.4 dapat dilihat bahwa dana berimbang pada tahun 2008-2017 Kota Bandar Lampung selalu mengalami peningkatan. Dilihat

<sup>12</sup> Deddy Supriady Bratakusumah, dan Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), h. 174

besarnya dana berimbang dibandingkan dengan pendapatan asli daerah (PAD) mengindikasikan masih rendahnya kemandirian akibat ketergantungan fiskal pemerintah Kota Bandar Lampung terhadap pemerintah pusat selama kurun waktu 2008-2017. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Abdul Halim dalam Reza Marizka bahwa kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain seperti bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman.<sup>13</sup> Tingkat kemandirian, efektivitas, dan desentralisasi keuangan daerah pemerintah/kota dalam pengelolaan dana yang diperoleh tersebut dapat mencerminkan kinerja pemerintahannya.

Kinerja adalah kesuksesan seseorang atau organisasi di dalam melaksanakan pekerjaan. Sejauh mana keberhasilan seseorang atau organisasi dalam menyelesaikan pekerjaannya disebut *level of performance*.<sup>14</sup> Dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah perlu dilakukanlah analisis rasio keuangan untuk menilai kinerja Pemerintahan Daerah yaitu analisis rasio efektivitas, rasio kemandirian dan rasio desentralisasi fiskal. Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi rill. Rasio kemandirian menunjukkan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai

---

<sup>13</sup> Reza Marizka, Skripsi: “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten dan Kota Di Sumatera Barat (Tahun 2006-2011”, (Padang: Universitas Negeri Padang, 2014), h. 3

<sup>14</sup> *Op.Cit*, h.2

sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>15</sup>

Rasio desentralisasi fiskal merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan kewenangan atau tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menggali dan mengelola pendapatan.<sup>16</sup> Sesuai

dengan firman Allah Qs. Al-Ahqaaf ayat 19 :

وَلِكُلِّ دَرَجَةٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٩﴾

Artinya: “dan bagi masing-masing derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerja-pekerja mereka sedang mereka tiada dirugikan.”

Dari ayat tersebut bahwasanya Allah pasti akan membalas setiap amal perbuatan manusia berdasarkan apa yang telah mereka kerjakan. Artinya jika seseorang melaksanakan pekerjaan dengan baik dan menunjukkan kinerja yang baik pula bagi organisasinya maka ia akan mendapat hasil yang baik pula dari kerjanya dan akan memberikan keuntungan bagi organisasinya.<sup>17</sup> Berdasarkan dari beberapa tabel di atas, diduga bahwa kinerja keuangan daerah Kota Bandar Lampung berdasarkan rasio efektivitas, kemandirian dan desentralisasi fiskal berada dalam posisi kurang baik sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Analisis Tingkat Efektivitas, Kemandirian dan**

---

<sup>15</sup> Andry Haryanto, *Op.Cit*, h.11-13

<sup>16</sup> Andry Haryanto, *Loc.Cit*

<sup>17</sup> Al-Qur'an dan Terjemah New Cordova, (Jawa Barat: PT. SYGMA Examedia Arkanleema, 2012), h. 504.

**Desentralisasi Keuangan Daerah menurut perspektif Ekonomi Islam (Studi kasus pada Pemerintah Kota Bandar Lampung tahun 2008-2017)”.**

**D. Identifikasi Masalah**

1. Belum tercapainya realisasi PAD sesuai dengan target anggaran untuk tahun 2009, 2013, 2014, 2015, 2016 dan 2017.
2. Masih tingginya penerimaan dana dari pemerintah pusat pada tahun 2008-2017.
3. Masih rendahnya kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah pada tahun 2008-2017.

**E. Batasan Masalah**

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah rasio yang digunakan dalam menghitung kinerja keuangan pemerintah Kota Bandar Lampung hanya 3 yaitu rasio efektivitas, rasio kemandirian dan rasio desentralisasi fiskal serta *trend* masing-masing rasio.

**F. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kinerja keuangan daerah Kota Bandar Lampung berdasarkan rasio efektivitas keuangan daerah pada tahun 2008-2017?

2. Bagaimana kinerja keuangan daerah Kota Bandar Lampung berdasarkan rasio kemandirian keuangan daerah pada tahun 2008-2017?
3. Bagaimana kinerja keuangan daerah Kota Bandar Lampung berdasarkan rasio desentralisasi fiskal keuangan daerah pada tahun 2008-2017?
4. Bagaimana pandangan Ekonomi Islam tentang kinerja keuangan daerah Kota Bandar Lampung tahun 2008-2017?

## **G. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui kinerja keuangan daerah Kota Bandar Lampung berdasarkan rasio efektivitas keuangan daerah pada tahun 2008-2017.
- b. Untuk mengetahui kinerja keuangan daerah Kota Bandar Lampung berdasarkan rasio kemandirian keuangan daerah pada tahun 2008-2017.
- c. Untuk mengetahui kinerja keuangan Kota Bandar Lampung berdasarkan rasio desentralisasi fiskal keuangan daerah pada tahun 2008-2017.
- d. Untuk mengetahui pandangan Ekonomi Islam tentang kinerja keuangan daerah Kota Bandar Lampung tahun 2008-2017.

### **2. Manfaat Penelitian**

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan:



1. Bagi Akademis, memberikan hasil pemikiran serta tambahan ilmu pengetahuan di bidang perekonomian kota Bandar Lampung khususnya pada tingkat efektivitas, kemandirian dan desentralisasi keuangan daerah menurut perspektif Ekonomi Islam (Studi kasus pada Pemerintah Kota Bandar Lampung tahun 2008-2017).
  2. Bagi Penulis, dapat menambah wawasan mengenai tingkat efektivitas, kemandirian dan desentralisasi keuangan daerah menurut perspektif Ekonomi Islam (Studi kasus pada Pemerintah Kota Bandar Lampung tahun 2008-2017).
- b. secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan:
1. Bagi pemerintah, diharapkan dapat diharapkan masing-masing pemerintah daerah mampu mengoptimalkan sumber Pendapatan Asli Daerah dan sebagai alternatif masukan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan pemerintah daerah secara ekonomis, efisien, dan efektif demi tercapainya keberhasilan otonomi daerah.
  2. Bagi masyarakat Sebagai bahan yang berguna dalam menambah pengetahuan, khususnya yang berminat dengan pembahasan mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Otonomi Daerah

##### 1. Pengertian Otonomi Daerah.

Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri, berdasarkan aspirasi masyarakat dalam system NKRI.<sup>18</sup> Menurut UU No. 22 tahun 1999, Otonomi daerah adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan undang-undang. Jadi daerah otonom merupakan wewenang yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah tertentu untuk mengelola sumber daya daerahnya sendiri dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan pasal 7 ayat (1) UU No. 22 tahun 1999, kewenangan yang diberikan kepada daerah (otonom) mencakup seluruh bidang pemerintahan kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, dan fiskal serta agama, berikut kewenangan bidang lain yang tercatum dalam ayat (2). Undang-Undang No.

---

<sup>18</sup> Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h.6

22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah apabila pemerintah (pusat) menyerahkan kewenangannya kepada daerah dalam rangka desentralisasi harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia sesuai dengan kewenangan yang diserahkan ( pasal 9 ayat (1)), Bahkan daerah berwenang mengelola sumber daya nasional yang tersedia di wilayahnya.<sup>19</sup>

Otonomi daerah harus didefinisikan sebagai otonomi bagi rakyat daerah dan bukan otonomi “daerah” dalam pengertian suatu wilayah / teritorial tertentu di tingkat lokal. Jika implementasi otonomi daerah di arahkan sebagai membesarnya kewenangan daerah maka kewenangan itu harus dikelola secara adil, jujur dan demokratis.<sup>20</sup>

## 2. Dasar Hukum Pelaksanaan Otonomi Daerah.

- a. Undang-undang dasar Negara republik Indonesia tahun 1945, Pasal 18 Ayat 1 - 7, Pasal 18A ayat 1 dan 2 , Pasal 18 B ayat 1 dan 2.
- b. Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, serta perimbangan keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka NKRI.

---

<sup>19</sup> Sri Soemantri, *Otonomi Daerah*, ( bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2014), h.13

<sup>20</sup> J. Kaloh, *Kepemimpinan Kepala Daerah: Pola Kegiatan, Kekuasaan dan Perilaku Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h.15

- c. Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah.
- d. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- e. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- f. UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah (Revisi UU No.32 Tahun 2004).<sup>21</sup>

### 3. Prinsip Pelaksanaan Otonomi Daerah

Prinsip otonomi yang berarti pemberian otonomi kepada daerah hendaknya berdasarkan pertimbangan, perhitungan tindakan dan kebijaksanaan yang benar-benar dapat menjamin bahwa daerah yang bersangkutan nyata-nyata mampu mengurus rumah tangganya sendiri. Prinsip otonomi daerah yang bertanggung jawab berarti bahwa pemberian otonomi daerah itu benar-benar sesuai dengan tujuannya yaitu:

- a. Lancar dan teraturnya pembangunan diseluruh wilayah Negara.
- b. Sesuai atau tidaknya pembangunan dengan pengarahan yang telah diberikan.
- c. Sesuai dengan pembinaan politik dan kesatuan bangsa.
- d. Terjaminnya keselarasan hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

---

<sup>21</sup> Indra Bastian, *Akuntansi Sektor Publik*, (Jakarta: ERLANGGA, 2005). h. 337

- e. Terjaminnya pembangunan dan perkembangan daerah.

Tujuannya pemberian otonom kepada daerah berorientasi kepada pembangunan yaitu pembangunan dalam arti luas yang meliputi semua segi kehidupan dan pengidupan.<sup>22</sup> Dengan demikian, otonomi daerah lebih condong merupakan kewajiban daripada hak. Hal ini berarti bahwa daerah mempunyai kewajiban melancarkan jalannya pembangunan dengan sungguh-sungguh dan penuh dengan rasa tanggung jawab sebagai sarana untuk mencapai cita-cita bangsa yaitu masyarakat yang adil dan makmur baik material maupun spiritual.

#### 4. Ciri Utama Keberhasilan Pelaksanaan Daerah Otonom

Menurut Halim dalam Muhammad Zaenuddin, ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan otonomi adalah :

- a. kemampuan keuangan daerah, yang berarti daerah tersebut memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan;
- b. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, oleh karena itu, PAD harus menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Dengan kata lain,

---

<sup>22</sup> Prof.Drs. C.S.T Kansil, dan Christine S.T Kansil, *System Pemerintahan Inonesia*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002), h.149



keberhasilan pengembangan otonomi daerah bisa dilihat dari derajat otonomi fiskal pdaerah yaitu perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total penerimaan APBD yang semakin meningkat.<sup>23</sup>

## **B. Keuangan Daerah**

### **1. Pengertian Keuangan Daerah**

Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka anggaran pendapatan dan belanja daerah.<sup>24</sup> Keuangan daerah juga dapat di artikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang juga segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh Negara atau daerah lain.<sup>25</sup> Jadi keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban yang dimiliki oleh daerah tertentu berupa uang atau barang yang didalamnya mengandung nilai.

Dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak dapat dilakukan pemisahan dan merupakan satu kesatuan. Dalam otonomi daerah

---

<sup>23</sup> Muhammad Zaenuddin, *“evaluasi pelaksanaan otonomi daerah dengan alat analisis derajat otonomi fiskal daerah*, (Malang: Universitas Gajah Mada, 2007), h.2

<sup>24</sup> Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemeritah Daerah di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002), h.230

<sup>25</sup> Abdul Halim, *Akuntansi Keuangan Daerah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2008), h.23

masalahnya bukan hanya pelimpahan wewenang dan pembiayaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, tetapi yang lebih penting adalah keinginan untuk meningkatkan efesiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya keuangan daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>26</sup>

## 2. Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut PP 58 Tahun 2005 Pasal 1, Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, piñata usahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Sistem pengelolaan keuangan pada dasarnya merupakan sub-sistem dari sistem pemerintahan itu sendiri. Sebagaimana sistem keuangan Negara yang di amanatkan dalam pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Aspek pengelolaan keuangan daerah juga merupakan sub-sistem yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah khususnya pasal 78 sampai dengan pasal 86. Pada pasal 80 ditetapkan bahwa perimbangan keuangan pusat dan daerah diatur dengan undang-undang.

Peraturan tersebut diharapkan terdapat keseimbangan yang lebih transparan dan akuntabel dalam pendistribusian kewenangan, pembiayaan, dan penataan sistem pengelolaan keuangan yang lebih baik. Dalam mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah secara optimal sesuai dengan

---

<sup>26</sup>Ahmad Yani, *Ibid*, h. 230

dinamika dan tuntutan masyarakat yang berkembang.<sup>27</sup> Pada Permendagri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2007 menyatakan bahwa APBD harus disusun dengan memperhatikan prinsip-prinsip pokok anggaran sektor publik, sebagai berikut:

- a. Partisipasi Masyarakat.
- b. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran.
- c. Disiplin Anggaran.
- d. Keadilan Anggaran.
- e. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran.
- f. Taat Asas.<sup>28</sup>

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

a. Pengertian APBD

APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan UU No. 17 Tahun 2003, disebutkan bahwa Anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

---

<sup>27</sup> Ahmad yani, *Op.Cit*, h.230

<sup>28</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

## b. Struktur APBD

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

### 1) Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.<sup>29</sup> Pendapatan daerah juga dapat diartikan sebagai pendapatan yang dihasilkan oleh daerah tersebut seperti pajak, retribusi dan lain-lain. Pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan (DP), dan lain-lain pendapatan yang sah (LPS).

#### a) Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari berbagai potensi penerimaan yang ada dan dimiliki oleh masing-masing daerah, yang selanjutnya disebut kekayaan daerah. Sesuai dengan jiwa otonomi daerah. Maka kepada pemerintah daerah diberi keleluasaan untuk menggali sumber-sumber yang ada di daerah masing-masing, sejalan dengan prinsip otonomi daerah dan azas desentralisasi yang kita anut. Sumber pendapatan asli daerah terdiri atas berikut ini:

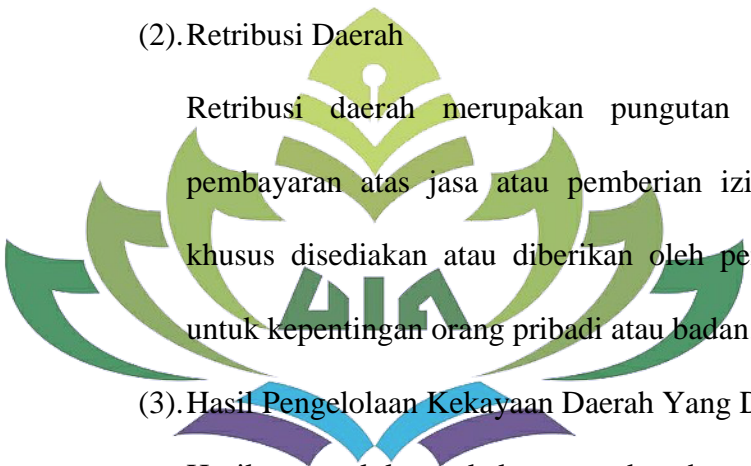
---

<sup>29</sup> Direktorat jenderal perimbangan keuangan, *Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal Di Indonesia*, (Jakarta pusat: Departemen keuangan republic indonesia 2009),h.35

(1). Pajak Daerah.

Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

(2). Retribusi Daerah



Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

(3). Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan Penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

(4). Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Wempy Banga, *Administrasi Keuangan Negara dan Daerah: Konsep, Teori, dan Fenomena di Era Otonomi Daerah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), h.94

b) Dana Berimbang

Secara teoritis, dana berimbang adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan azas desentralisasi yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Secara notmatif, lebih lanjut di atur dalam Undang-Undang RI No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bahwa dana perimbangan terdiri atas:

(1). Dana Bagi Hasil.

Dana bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

(2). Dana Alokasi Umum.

Dana alokasi umum merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antara daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.



(3). Dana Alokasi Khusus.

Dana alokasi khusus merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.<sup>31</sup>

c) Lain-Lain Pendapatan Yang Sah

Menurut yani dalam wempy banga, lain-lain pendapatan yang sah adalah pendapatan daerah dari sumber lain misalnya sumbangan pihak ketiga kepada daerah yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.<sup>32</sup>

2) Belanja Daerah

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran uang dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh daerah.

3) Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada

---

<sup>31</sup> Undang-Undang Otonomi Daerah (Bandung:Citra Umbara, 2004), h. 267

<sup>32</sup> Wempy Banga, *Op.Cit*, h.90

tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah adalah transaksi keuangan pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus APBD.<sup>33</sup>

### C. Kinerja Keuangan Daerah

#### 1. Pengertian Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja adalah pencapaian atas apa yang direncanakan, baik oleh pribadi maupun organisasi. secara sederhana, kinerja seseorang atau organisasi dikatakan baik apabila hasil yang dicapai sesuai dengan target yang direncanakan. Apabila pencapaian melebihi target, maka kinerja dikatakan sangat baik, sedangkan apabila lebih rendah dari target maka dapat dikatakan bahwa kinerjanya buruk.

Sedangkan kinerja keuangan adalah tingkat capaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran.<sup>34</sup> Kinerja keuangan juga dapat di artikan sebagai suatu ukuran

---

<sup>33</sup> A.R.Kaeng, "Analisis pendapatan asli daerah untuk belanja daerah pada pemerintah kota tomohon". *Jurnal Emba.*, Vol. 3 No. 2 Juni (2015), h.960

<sup>34</sup> Andri Haryanto, *Op.Cit.* h.16

kinerja yang menggunakan indikator keuangan.<sup>35</sup> Jadi dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan merupakan gambaran kondisi keuangan pada suatu periode tentu.

Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja dimasa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut karena menggunakan indikator keuangan, maka alat analisis yang tepat untuk mengukur kinerja keuangan adalah analisis keuangan.<sup>36</sup>

## 2. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Dalam hubungan pengukuran kinerja, beberapa hal penting perlu mendapat penekanan yaitu mengenai penetapan indikator kinerja, penetapan pencapaian kinerja dan formullir pengukuran kinerja.

### a. Penetapan indikator kinerja

Penetapan kinerja merupakan proses identifikasi dan klasifikasi indikator kinerja melalui pengumpulan dan pengolahan data atau informasi untuk menentukan capaian tingkat kinerja kegiatan/ program.

---

<sup>35</sup> Mochamad Fajar Hidayat, Skripsi: “*Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal (Studi Pada Kabupaten dan Kota di Jawa Timur)*”, (Malang: Universitas Negeri Brawijaya, Malang, 2013), h. 7

<sup>36</sup> *Ibid*, h.7

Penetapan indikator kinerja tersebut didasarkan pada kelompok menurut masukan (*input*), keluaran (*output*), manfaat (*benefit*), hasil (*outcome*) dan dampak (*impact*) serta indikator proses jika diperlukan untuk menunjukkan proses manajemen kegiatan yang telah terjadi. Indikator kinerja mempunyai peranan sebagai :

- 1) Sebagai alat untuk memastikan pemahaman para pelaksana terhadap ukuran yang digunakan untuk pencapaian kinerja.
- 2) Sebagai sarana untuk memonitor sejauh mana upaya yang telah dilakukan mendekati kinerja yang telah direncanakan.
- 3) Sebagai sarana mengevaluasi pencapaian kinerja dengan membandingkannya dengan kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.
- 4) Sebagai alat untuk memberikan penghargaan ataupun hukuman yang objektif bagi para pelaksananya.
- 5) Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi.
- 6) Menjadi alat untuk memperbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- 7) Menjadi alat untuk membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah.
- 8) Menjadi alat untuk memastikan pengambilan keputusan dilakukan secara objektif.

b. Penetapan Pencapaian Kinerja

Penetapan pencapaian kinerja dimaksudkan untuk mengetahui dan menilai pencapaian kinerja dari pelaksanaan kegiatan/program dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh suatu instansi pemerintah. Pencapaian indikator-indikator tersebut tidak terlepas dari proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan. Misalnya, keterkaitan antara tingkat pencapaian kinerja *output* tertentu dengan proses pencapaiannya seperti kecepatan dan keakuratan, ketaatan pada peraturan perundangan dan keterlibatan kelompok target terkait. Dengan demikian sesungguhnya disamping kelompok indikator menurut *input*, *output*, *outcomes*, *benefit*, dan *impact*, juga terdapat kelompok indikator menurut proses.

c. Formulir Pengukuran Kinerja

Untuk memudahkan evaluasi atas kesesuaian, keselarasan antara kegiatan dan program atau antara program penunjang dengan program utama atau antara program yang lebih rendah dengan program yang lebih tinggi dapat digunakan formulir PK (Pengukuran kerja).<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Rahardjo Adisasmita, *Manajemen Pemerintah Daerah*, (Yogyakarta :Graha Ilmu, 2010), h.92

### 3. Tujuan dan Manfaat Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah

#### a. Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah

Tujuannya dilakukan pengukuran kinerja menurut Mahmudi dalam Dhimas Angga Permana dan Ikhsan Budi Riarjo adalah:

- 1.) Mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi.
- 2.) Menyediakan sarana pembelajaran pegawai.
- 3.) Memperbaiki kinerja periode berikutnya.
- 4.) Memberikan pertimbangan yang sistematis dalam pembuatan keputusan pemberian *reward* dan *punishmen*.
- 5.) Memotivasi pegawai.
- 6.) Menciptakan akuntabilitas pegawai.

#### b. Manfaat Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah

- 1) Memastikan pemahaman para pelaksana dan ukuran yang digunakan untuk pencapaian kinerja.
- 2) Memastikan tercapainya skema kinerja yang disepakati.
- 3) Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja dan membandingkannya dengan skema kerja serta melakukan tindakan untuk memperbaiki kinerja.
- 4) Memberikan penghargaan dan hukuman yang objektif atas kinerja yang dicapai setelah dibandingkan dengan skema indikator kinerja yang telah disepakati.



- 5) Menjadikan alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam upaya memperbaiki kinerja organisasi.
- 6) Mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi.
- 7) Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah.
- 8) Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif.
- 9) Menunjukkan peningkatan yang perlu dilakukan.
- 10) Mengungkap permasalahan yang terjadi.<sup>38</sup>

#### 4. Analisis Kinerja Keuangan Daerah

##### a. Rasio Efektivitas Keuangan Daerah

Rasio efektivitas keuangan daerah otonom (selanjutnya disebut “Rasio EKD”) menunjukkan kemampuan pemerintahan daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target penerimaan pendapatan asli daerah. Perhitungan rasio efektivitas keuangan daerah:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100$$

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal 100%. Namun, semakin tinggi rasio

---

<sup>38</sup> Dhimas Angga Permana, dan Ikhsan Budi Riarjo, “Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah Daerah dalam Perspektif Value For Money”, *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* , Vol.6 No.5 (Mei 2017), h. 2166.

efektivitas menggambarkan kemampuan daerah semakin baik. Departemen Dalam Negeri dengan Kepmendagri No.690.900-327, Tahun 1996 mengategorikan kemampuan efektivitas keuangan daerah otonom ke dalam lima tingkat efektivitas seperti terlihat pada Tabel 2.1 :

**Tabel 2.1**  
**Kriteria Efektivitas Keuangan Daerah**

<b>Rasio Efektivitas</b>	<b>Persentase (%)</b>
Sangat Efektif	> 100
Efektif	> 90-100
Cukup Efektif	> 80-90
Kurang Efektif	> 60-80
Tidak Efektif	≤ 60

*Sumber : Depdagri, Kepmendagri tahun 2002*

Selanjutnya *Trend* efektivitas keuangan daerah penting dinilai untuk mengetahui arah perkembangan dimensi efektivitas keuangan daerah. Suatu daerah otonom kabupaten/kota pada suatu tahun tertentu barangkali belum dapat memenuhi efektivitas keuangannya, tetapi dengan melihat *trend* positif dari kedua dimensi keuangan tersebut diperoleh keyakinan, walaupun lambat ada peluang akan menuju efektivitas keuangan daerah yang ideal.

Amin dalam Dori Saputra menyatakan bahwa persentase *trend* digunakan apabila ingin melihat perkembangan suatu perusahaan. Dalam menghitung persentase digunakan salah satu tahun sebagai tahun dasar. Apabila suatu tahun dipilih sebagai tahun dasar, maka data dalam tahun

tersebut dinyatakan dengan angka seratus, yang artinya 100% dan data sejenis dalam tahun berikutnya dinyatakan dalam angka persentase dari data tahun dasar.<sup>39</sup>

Analisis *trend* efektivitas keuangan daerah digunakan untuk mengetahui arah perkembangan efektivitas keuangan daerah tersebut. Apabila persentase *trend* EKD lebih dari 100%, maka telah terjadi perkembangan EKD. Semakin besar persentase *trend* EKD dari tahun ke tahun maka arah perkembangan efektivitas keuangan daerah di Kota Bandar Lampung. Sebaliknya, bila persentase kurang dari 100% maka terjadi penurunan efektivitas keuangan. Perhitungan *trend* efektivitas keuangan daerah di Kota Bandar Lampung.

Dalam penelitian ini, tahun 2008 merupakan tahun dasar yang akan digunakan sebagai tahun dasar untuk melihat arah perkembangan EKD pada tahun berikutnya (Tahun 2009 sampai dengan 2017). Dengan demikian, *trend* yang diperoleh nanti dapat diinterpretasikan sebagai arah perkembangan yang terjadi dengan diimplementasikannya reformasi otonomi dan keuangan daerah.

Dari penjelasan ini maka *trend* efektivitas keuangan daerah dapat diformulasikan sebagai berikut:

---

<sup>39</sup> Dori Saputra, “Analisis Kemandirian dan Efektivitas Keuangan Daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat”, (Padang: Universitas Negeri Padang, 2014), h.11

$$Trend\ EKD = \frac{EKD\ Tahun\ Pembanding}{EKD\ Tahun\ Dasar} \times 100$$

b. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah (selanjutnya disebut “Rasio KKD”) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah, yang dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$Rasio\ Kemandirian = \frac{Pendapatan\ Asli\ Daerah}{Bantuan\ Pemerintah\ Pusat} \times 100$$

Berdasarkan formula di atas dapat diketahui bahwa rasio KKD menggambarkan sejauh mana ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi rasio ini berarti tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan propinsi) semakin rendah, demikian pula sebaliknya. Rasio ini juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen dari PAD.

**Tabel 2.2**  
**Pola Hubungan dan Kriteria Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah**

<b>Kemampuan / Ketergantungan Keuangan Daerah</b>	<b>Persentase</b>	<b>Pola Hubungan</b>
Rendah Sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	25% - 50%	Konsultatif
Sedang	50% - 75%	Partisipatif
Tinggi	75% - 100%	Delegatif

*Sumber : Depdagri, Kepmendagri tahun 2002*

Selanjutnya Kecenderungan kemandirian keuangan daerah penting dinilai untuk mengetahui arah perkembangan kedua dimensi keuangan ini. Suatu daerah otonom kabupaten/kota pada suatu tahun tertentu barangkali belum dapat memenuhi kemandirian keuangannya, tetapi dengan melihat *trend* positif dari dimensi kemandirian keuangan tersebut diperoleh keyakinan, walaupun lambat ada peluang akan menuju kemandirian keuangan daerah yang ideal.

Amin dalam Dori Saputra menyatakan bahwa persentase *trend* digunakan apabila ingin melihat perkembangan suatu perusahaan. Dalam menghitung persentase digunakan salah satu tahun sebagai tahun dasar. Apabila suatu tahun dipilih sebagai tahun dasar, maka data dalam tahun tersebut dinyatakan dengan angka seratus, yang artinya 100% dan data sejenis dalam tahun berikutnya dinyatakan dalam angka persentase dari data tahun dasar.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Dori Saputra, *Op.Cit*, h.10

Analisis *trend* kemandirian keuangan daerah digunakan untuk mengetahui arah perkembangan kemandirian keuangan daerah tersebut. Apabila persentase *trend* KKD lebih dari 100%, maka telah terjadi perkembangan KKD. Semakin besar persentase *trend* KKD dari tahun ke tahun maka arah perkembangan kemandirian keuangan di Kota Bandar Lampung semakin baik. Sebaliknya, bila persentase kurang dari 100% maka terjadi penurunan kemandirian keuangan kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Barat.

Dalam penelitian ini, tahun 2008 merupakan tahun dasar yang akan digunakan sebagai tahun dasar untuk melihat arah perkembangan KKD pada tahun berikutnya (tahun 2009 sampai dengan 2017). Dengan demikian, *trend* yang diperoleh nanti dapat diinterpretasikan sebagai arah perkembangan. Perhitungan *trend* kemandirian keuangan daerah yang terjadi dengan diimplementasikannya reformasi otonomi dan keuangan daerah.<sup>41</sup>

Dari penjelasan ini maka *trend* kemandirian keuangan daerah dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$Trend\ KKD = \frac{KKD\ Tahun\ Pembanding}{KKD\ Tahun\ Dasar} \times 100$$

---

<sup>41</sup> Dori Saputra, *Op.Cit*, h.9-11



c. Rasio Desentralisasi Keuangan Daerah

Rasio desentralisasi fiskal merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan kewenangan atau tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menggali dan mengelola pendapatan. Perhitungan desentralisasi fiskal:

$$\text{Rasio Desentralisasi} = \frac{\text{Total Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100$$

**Tabel 2.3**  
**Tingkat Desentralisasi Fiskal Keuangan Daerah**

Kemampuan keuangan daerah	Desentralisasi %
Sangat kurang	0,00-10,0%
Kurang	10,01-20,00%
Sedang	20,01-30,00%
Cukup	30,01-40,00%
Baik	40,01-50,00%
Sangat baik	>50,00%

*Sumber : Depdagri, Kepmendagri Tahun 2002*

Selanjutnya analisis *trend* desentralisasi keuangan daerah digunakan untuk mengetahui arah perkembangan kemampuan pemerintah daerah memaksimalkan tanggung jawab yang diberikan. Semakin besar persentase *trend* desentralisasi dari tahun ke tahun maka arah perkembangan kemampuan pemerintah/kota dalam menggali potensi

daerahnya semakin baik dan sebaliknya.<sup>42</sup> Perhitungan *trend* desentralisasi fiskal:

$$Trend\ DKD = \frac{DKD\ Tahun\ Pembanding}{DKD\ Tahun\ Dasar} \times 100$$

##### 5. Pandangan Ekonomi Islam Tentang Kinerja Keuangan Daerah

Lawler dan Porter dalam Ima Amaliah, Aan Julia, dan Westi Riani, Kinerja adalah keberhasilan pencapaian peran yang diperoleh seseorang atas apa yang diperbuatannya.<sup>43</sup> Menurut Fajar Nugroho, Kinerja merupakan pencapaian atas apa yang direncanakan, baik oleh pribadi maupun organisasi.<sup>44</sup> Dalam pandangan ekonomi Islam, kinerja (hasil kerja) terkait dengan segala sesuatu yang telah dilakukan oleh seorang individu relevan dengan standar tertentu. Kinerja dalam penelitian ini adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi anggaran dan realisasi PAD, dana berimbang serta pendapatan daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama beberapa periode anggaran.

---

<sup>42</sup> Andri Haryanto, *Op.Cit.* h.23

<sup>43</sup> Ima Amaliah, Aan Julia, dan Westi Riani “Pengaruh Nilai Islam Terhadap Kinerja Kerja”. *Jurnal Mimbar*. Vol 29 No. 3 (2013), h.167

<sup>44</sup> Fajar Nugroho, skripsi: *Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah Dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening: Studi Kasus Diprovinsi Jawa Tengah*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2012), h. 17

Terkait dengan kinerja manusia, Allah mengungkapkannya dalam bentuk pahala dan siksa. Ketika manusia melaksanakan segala perintah Allah maka Allah memberinya pahala. Sebaliknya ketika manusia melanggar aturan yang telah digariskan-Nya, maka Allah akan mengazabnya dengan siksa yang pedih, sebagaimana dijelaskan dalam beberapa ayat dalam Al-Quran diantaranya Surat Al-Kahfi ayat 87-88 yang berbunyi:

قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُّكَرًا ﴿٨٧﴾  
وَأَمَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءٌ أَحْسَنُ ۖ وَسنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ﴿٨٨﴾

Artinya: "...Barang siapa berbuat zalim, kami akan menghukumnya, lalu dia dikembalikan kepada Tuhannya, kemudian Tuhan mengazabnya dengan azab yang sangat keras. Adapun orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka dia mendapat pahala yang terbaik sebagai balasan...."

Menurut Alorfi dalam Ima Amaliah, Aan Julia, dan Westi Riani, penilaian kerja dalam pandangan Islam harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang diajarkan Al-Quran yaitu:

1. Keadilan, kompetensi (QS. An-Nissa ayat 32)

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا  
اَكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اَكْتَسَبْنَ ۚ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ  
كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

Artinya : “Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

2. Kejujuran (QS. Al-Maidah ayat 8)

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اَعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

3. Usaha (QS. An-Najm ayat 39)

وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ

Artinya: “Dan bahwa seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya”.

4. Inisiatif , Pengalaman Kerja (QS. Ar-Raad ayat 11).

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ ۚ ...

Artinya: "...Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri...".

5. Kreativitas individu (QS. Al-Zukhruf ayat 32).

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۚ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا  
وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا  
وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya: "Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan".

Sedangkan menurut Sastrohadiwijoyo dalam Ima Amaliah, Aan Julia, dan Westi Riani, hal-hal yang harus diperhatikan dalam penilaian kinerja yaitu kesetiaan, prestasi kerja, tanggung jawab, ketaatan, kejujuran, kerjasama serta prakarsa kepemimpinan dari seorang pegawai.<sup>45</sup>

Firman allah Qs. Al-Ahqaaf ayat 19 :

وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ مِّمَّا عَمِلُوا ۖ وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٩﴾

Artinya: "dan bagi masing-masing derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerja-pekerja mereka sedang mereka tiada dirugikan."

<sup>45</sup> Ima Amaliah, Aan Julia, dan Westi Riani , *Op.Cit*, h.167-168

Dari ayat tersebut bahwasanya Allah pasti akan membalas setiap amal perbuatan manusia berdasarkan apa yang telah mereka kerjakan. Artinya jika seseorang melaksanakan pekerjaan dengan baik dan menunjukkan kinerja yang baik pula bagi organisasinya maka ia akan mendapat hasil yang baik pula dari kerjaannya dan akan memberikan keuntungan bagi organisasinya.<sup>46</sup>

Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Araaf ayat 39:

وَقَالَتْ أُولَئِهِمْ لِأَخَرِهِمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فذُوقُوا الْعَذَابَ  
بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿٣٩﴾

Artinya : *"Dan Berkata orang-orang yang masuk terdahulu di antara mereka kepada orang-orang yang masuk kemudian: "Kamu tidak mempunyai kelebihan sedikitpun atas kami, Maka rasakanlah siksaan Karena perbuatan yang Telah kamu lakukan".*

Ayat di atas menjelaskan bahwasanya segala kelebihan hanya milik Allah, oleh karena itu bekerja tidak hanya sebatas ubudiyah saja, karena pekerjaan merupakan proses yang frekuensi logisnya adalah pahala (balasan) yang akan kita terima. Dalam konteks ini, pekerjaan tidak hanya bersifat ritual dan ukhrowi, akan tetapi juga merupakan pekerjaan sosial yang bersifat duniawi.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Al-Qur'an dan Terjemah New Cordova, *Loc.Cit*

<sup>47</sup> Rafida. "Analisis Kompetensi Terhadap Kinerja Keuangan di Lembaga Keuangan Mikro Syariah Kota Jambi". *Jurnal Nalar Fiqh*, Vol 9 No. 1 (2014), h. 10



#### D. Tinjauan pustaka

**Tabel 2.4**  
**Ringkasan Tinjauan Pustaka**

Penelitian dan tahun penelitian	Judul penelitian terdahulu	Metode dan variabel	Hasil
Dori saputra (2014)	Analisis kemandirian dan efektivitas keuangan daerah pada kabupaten dan kota di provinsi sumatera barat	Metode analisis data: analisis rasio  Variabel : Kinerja keuangan dengan: rasio kemandirian keuangan, rasio efektivitas keuangan, rasio <i>Trend</i> KKD, dan rasio <i>Trend</i> EKD.	Kemandirian keuangan daerah masih ketergantungan terhadap bantuan ekstren. Efektivitas PAD pada tahun 2004-2011 sangat efektif. <i>Trend</i> kemandirian keuangan daerah cenderung menurun karena kurang dari 100%. <i>Trend</i> efektivitas keuangan daerah nya naik karena presentasi lebih dari 100%.
Oesi Agustuna. A (2013)	Jurnal analisis kinerja pengelolaan keuangan daerah dan tingkat kemandirian daerah di era otonomi daerah: studi kasus kota malang. (tahun anggaran 2007-2011)	Metode analisis data: analisis rasio  Variabel : Kinerja keuangan dengan: tingkat kemandirian daerah, tingkat efektivitas dan efisiensi, tingkat aktivitas dan tingkat pertumbuhan daerah.	Analisis rasio keuangan daerah dapat disimpulkan bahwa secara umum kinerja pengelolaan keuangan daerah dan tingkat kemandirian daerah kota Malang yang terus membaik. Hal tersebut dapat terlihat dari beberapa rasio kinerja keuangan daerah yaitu rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas, dan rasio efisiensi yang terus meningkat dan berpengaruh baik terhadap kemandirian daerahnya meskipun ada beberapa rasio kinerja keuangan daerah yang terus menurun atau memiliki <i>trend</i> negatif seperti rasio aktivitas dan rasio pertumbuhan
Andry	Analisis	Metode analisis	Berdasarkan rasio efektivitas



Haryanto (2014)	efektivitas, kemandirian dan desentralisasi pemerintah kota medan.	data: analisis rasio  Variabel : Kinerja keuangan dengan: Rasio efektivitas, rasio kemandirian, dan rasio desentralisasi fiskal.	secara rata-rata efektivitas keuangan daerah pada pemerintah kota Medan tahun 2009-2013 sudah cukup baik dengan persentase sebesar 87,96. Dilihat dari <i>trend</i> rasio efektivitas mengalami penurunan selama tahun 2009-2012 dengan rata-rata 72,74 karena persentase masih kurang dari 100 persen. Rasio kemandirian keuangan daerah pada pemerintah Kota Medan pada tahun 2009-2013 dengan rata-rata sebesar 48,96 dikategorikan rendah karena nilai tersebut berada diantara 25-50 persen, maka Kota Medan dianggap masih memiliki ketergantungan terhadap bantuan pusat dan provinsi, meskipun pola ketergantungan daerah mulai berkurang karena di kota Medan dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah. kontribusi pendapatan asli daerah terhadap total penerimaan daerah kota Medan dilihat dari desentralisasi fiskal menunjukkan kemampuan yang cukup baik dengan rata-rata persentase sebesar 36,80 persen.
Ririn Dwi Anggraini (2015)	Analisis kemampuan daerah, tingkat kemandirian dan efektivitas realisasi anggaran pemerintah kota	Metode analisis data: analisis rasio  Variabel : Kinerja keuangan dengan: Rasio kemampuan daerah, rasio efektivitas, dan rasio	Ditinjau dari kemampuan keuangan daerah yang diukur dengan rasio Derajat Otonomi Fiskal (DOF) dan Rasio Indeks Kemampuan Rutin (IKR), Pemerintah Kota Tangerang dinilai cukup mampu untuk melaksanakan otonomi daerah. Selain itu kinerja keuangan yang diukur menggunakan rasio efektivitas PAD menunjukkan

	tangerang tahun anggaran 2010-2014.	kemandirian.	<p>hasil positif. Pemerintah Kota Tangerang mampu merealisasikan PAD sesuai dengan target yang ditetapkan bahkan mampu melebihi target, dengan rasio rata-rata 120,32% yang dapat dikatakan efektif. Sementara itu pengukuran menggunakan rasio kemandirian belum menunjukkan hasil yang baik. Secara rata-rata selama 5 tahun tingkat kemandirian Kota Tangerang masih berada pada angka dibawah 50%, artinya tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat melalui dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah masih cukup tinggi. Tetapi dengan angka tersebut membentuk pola hubungan konsultatif yang artinya peran pemerintah pusat sudah mulai berkurang meskipun sedikit dan dianggap cukup mampu untuk melaksanakan otonomi daerah.</p>
Cheris Enjelita Kaunang, Amran T Naukoko, dan Albert T Londa (2016)	Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan daerah dan tingkat kemandirian daerah di era otonomi daerah: studi pada kota manado (tahun 2010-2014)	<p>Metode analisis data: analisis rasio</p> <p>Variabel : Kinerja pengelolaan keuangan dengan: Rasio efektivitas, dan rasio kemandirian, rasio aktivitas dan rasio pertumbuhan.</p>	<p>Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Manado masih kurang mandiri dalam membiayai daerah sendiri, namun Pemerintah Kota Manado masih terus berusaha untuk bisa mandiri jika dilihat dari peningkatan hasil persentase kemandirian keuangan daerah, Pemerintah Kota Manado juga sangat efektif dalam merealisasikan PAD terbukti dari hasil persentase rasio efektivitas yang rata-ratanya 106.95% dan selalu mengalami peningkatan di tiap tahun, dari rasio aktivitas bisa</p>

			dilihat bahwa Pemerintah Kota Manado lebih memprioritaskan anggaran pada belanja pembangunan dibanding belanja rutin, dan pertumbuhan Kota Manado sudah cukup baik meskipun masih kurang stabil
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Penelitian yang sama telah dilakukan oleh Dori saputra (2014), Oesi Agustuna.A (2013), Andry Haryanto (2014), Ririn Dwi Anggraini (2015), dan Cheris Enjelita Kaunang, Amran T Naukoko, dan Albert T Londa (2016). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah rasio yang digunakan dan tempat atau objek penelitian. Pada penelitian ini akan dilakukan analisis kinerja keuangan pada Kota Bandar Lampung yang terdiri dari indikator efektivitas dan kemandirian keuangan daerah. Selanjutnya akan dilihat perubahan kinerja keuangan pada Kota Bandar Lampung, apakah semakin meningkat, menurun, stabil atau berfluktuasi. Selain itu akan dilihat apakah kinerja keuangan daerah Kota Bandar Lampung sudah efektif atau belum serta apakah Kota Bandar Lampung sudah bisa membiayai urusan rumah tangganya sendiri.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Kerangka Pemikiran adalah sebuah pemahaman yang melandasi pemahaman-pemahaman yang lainnya, sebuah pemahaman yang paling mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses dari

keseluruhan dari penelitian yang akan dilakukan.<sup>48</sup> APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.<sup>49</sup> Sedangkan LRA adalah salah satu komponen laporan keuangan pemerintah. Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah secara umum terdiri dari tingkat kemandirian keuangan daerah, tingkat efektivitas keuangan daerah, dan desentralisasi fiskal.

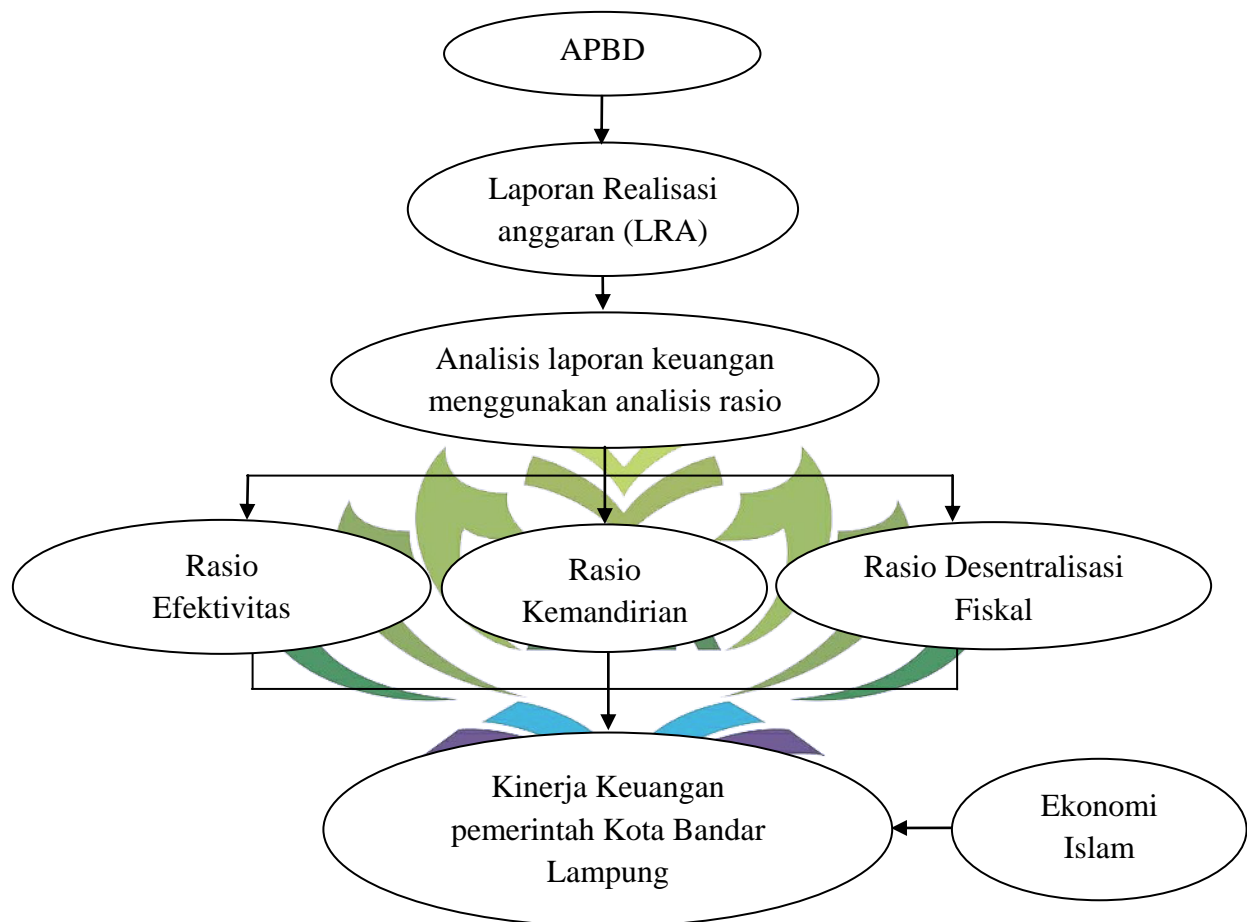
Semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah semakin baik, Semakin tinggi Rasio Kemandirian berarti tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat atau propinsi) semakin rendah dan semakin tinggi rasio desentralisasi fiskal, semakin baik kemampuan daerah dalam menjalankan tanggung jawab serta dalam menggali dan mengelola pendapatan yang dimiliki. Pembangunan daerah yang dilaksanakan secara otonom harus disertai dengan penguatan penerimaan fiskal daerah sebagai landasan bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Tingkat kemandirian suatu daerah dapat diukur dari kemampuan pendapatan asli daerah dalam membiayai pembangunan daerahnya. Jika suatu daerah semakin mandiri maka pendapatan asli daerah akan semakin mampu membiayai pembangunan

---

<sup>48</sup> Sugiyono, *metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabet, 2011), h.60

<sup>49</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, (Jakarta: Perum percetakan Negara RI, 2004), h.13

daerahnya sendiri, sehingga dana alokasi umum kepada daerah tersebut akan semakin kecil.



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**

## BAB III

### METODE DAN TEKNIK PENELITIAN

#### A. Jenis dan Sifat Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif. Metode kuantitatif adalah metode penelitian yang dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.<sup>50</sup>

##### 2. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung pada saat ini atau saat yang lampau.<sup>51</sup> Penelitian deskriptif dalam penelitian ini untuk menggambarkan dan menganalisis kemampuan daerah serta kinerja keuangan pemerintah Kota Bandar Lampung yang diukur melalui analisis rasio yaitu rasio efektivitas, rasio kemandirian, dan rasio desentralisasi fiskal.

---

<sup>50</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif dan kualitatif dan R&G*, (Bandung: Alfabet, 2013), h.8

<sup>51</sup>Asep saepul Hamdi, dan E. Bahrudin, *Metode Penelitian Kuantitatif Aplikasi dalam Pendidikan*, (Yogyakarta, Deepublish, 2015), h.5



## B. Jenis dan Sumber Data

Data kuantitatif merupakan data-data yang penyajiannya dalam bentuk angka yang secara sepiantas lebih mudah untuk diketahui maupun untuk dibandingkan satu dengan lainnya.<sup>52</sup> Data-data kuantitatif dalam penelitian ini menganalisis tingkat efektivitas, kemandirian dan desentralisasi keuangan daerah menurut perspektif Ekonomi Islam (studi kasus pada pemerintah Kota Bandar Lampung tahun 2008-2017).

Adapun data yang digunakan adalah sekunder. Data sekunder adalah data primer yang telah diolah lebih lanjut menjadi bentuk-bentuk seperti tabel, grafik, diagram, gambar, dan sebagainya sehingga lebih informatif oleh pihak lain.<sup>53</sup> Data sekunder dalam penelitian ini adalah data APBD tahun 2008-2017 yang didapatkan dari BPKAD kota Bandar Lampung tahun anggaran 2008-2017.

## C. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode dokumentasi, wawancara, dan studi pustaka.

1. Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal berupa benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dan sebagainya. Metode ini dilakukan dengan mengambil dokumentasi atau data yang mendukung

---

<sup>52</sup> Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011) h.97

<sup>53</sup> Husein Umar, *Metode riset bisnis*, (Jakarta: PT. Gramedia pustaka utama, 2003), h.84

penelitian seperti keuangan daerah Kota Bandar Lampung tahun 2008-2017 yang diperoleh dari BPKAD Kota Bandar Lampung.

2. Metode wawancara adalah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari orang yang diwawancarai.<sup>54</sup> Metode ini dilakukan dengan mewawancarai sekretaris di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD).
3. Metode studi pustaka merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka mencari landasan teoritis dari permasalahan penelitian. Metode ini dilakukan dengan mengambil data-data dari buku-buku, jurnal dan sumber-sumber lain yang terpercaya.

#### **D. Populasi dan Sampel**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas sekumpulan obyek yang menjadi pusat perhatian yang dari padanya terkandung informasi yang ingin diketahui.<sup>55</sup> Populasi yang akan di ambil dalam penelitian ini adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) setiap tahunnya.

Sampel adalah. bagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang digunakan untuk penelitian.<sup>56</sup> Sampel dalam penelitian ini adalah

---

<sup>54</sup> Ninit Alfianika *Buku ajar metode penelitian pengajaran bahasa Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), h. 118-119

<sup>55</sup> W. Gulo, *Metodelogi penelitian*, ( Jakarta: Grasindo, 2002), h. 76

<sup>56</sup> Wiratna Sujarweni, *Metodelogi penelitian bisnis dan ekonomi*, ( Yogyakarta : Pustaka baru press, 2015), h. 81

anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 10 tahun terakhir dari tahun 2008-2017.

Metode yang digunakan dalam mengambil sampel penelitian ini adalah *Purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu<sup>57</sup>. Adapun alasan pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah data yang diterbitkan dari BPKAD kota Bandar Lampung terbaru tersedia dibawah tahun 2017.

#### **E. Definisi Operasional Variabel**

Kinerja keuangan daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Variabel penelitian ini adalah kinerja keuangan yang diukur dengan menggunakan parameter berupa rasio efektivitas, rasio kemandirian, dan rasio desentralisasi fiskal serta *trend* dari masing-masing rasio.

---

<sup>57</sup> Ibid, h.108

**Tabel 3.1**  
**Definisi Operasional Variabel**

<b>Variabel</b>	<b>Ukuran</b>
Rasio efektivitas : menggambarkan kemampuan pemerintahan daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target penerimaan pendapatan asli daerah. <sup>58</sup>	Realisasi penerimaan PAD dibandingkan dengan target penerimaan PAD lalu di kali 100
<i>Trend</i> efektivitas : untuk mengetahui arah perkembangan dimensi efektivitas keuangan daerah. <sup>59</sup>	Efektivitas keuangan daerah tahun pembanding dibandingkan dengan efektivitas keuangan daerah tahun dasar.
Rasio kemandirian : menggambarkan kemampuan pemerintahan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber yang diperlukan oleh daerah. <sup>60</sup>	Pendapatan asli daerah dibandingkan dengan bantuan pemerintah pusat lalu di kali 100
<i>Trend</i> Kemandirian : untuk mengetahui arah perkembangan kemandirian keuangan daerah tersebut. <sup>61</sup>	Kemandirian keuangan daerah tahun pembanding dibandingkan dengan kemandirian keuangan daerah tahun dasar.
Rasio desentralisasi fiskal menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan kewenangan atau tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menggali dan mengelola pendapatan. <sup>62</sup>	Total pendapatan asli daerah dibandingkan dengan total pendapatan daerah lalu dikali 100
<i>Trend</i> desentralisasi fiskal : untuk mengetahui arah perkembangan kemampuan pemerintah daerah memaksimalkan tanggung jawab yang diberikan. <sup>63</sup>	Desentralisasi keuangan daerah tahun pembanding dibandingkan dengan desentralisasi keuangan daerah tahun dasar.

<sup>58</sup> Dori saputra, *Loc. Cit*

<sup>59</sup> *Ibid*,

<sup>60</sup> *Ibid*,

<sup>61</sup> *Ibid*,

<sup>62</sup> Dori saputra, *Loc. Cit*

<sup>63</sup> *Ibid*,

Kinerja keuangan pemerintah : kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya system pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak bergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan di dalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan. <sup>64</sup>	Rasio efektivitas, rasio kemandirian dan rasio desentralisasi
Kinerja dalam Ekonomi Islam : segala sesuatu yang telah dilakukan seorang individu relevan dengan standar tertentu. <sup>65</sup>	Keadilan, kejujuran, usaha, inisiatif, kreativitas individu

## F. Analisis Data

Setelah keseluruhan data terkumpul, maka langkah selanjutnya penulis menganalisis data tersebut sehingga dapat ditarik kesimpulan. Dalam penelitian ini tehnik analisis data yang digunakan adalah analisis *statistik deskriptif*. Analisis *statistik deskriptif* merupakan tehnik menganalisis data untuk meringkas dan mendeskripsikan data numerik agar mudah untuk di interpretasikan.<sup>66</sup> Langkah langkah yang dalam teknik analisis data ini sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian, objek penelitian yaitu pada kantor BPKAD Kota Bandar Lampung..

<sup>64</sup> Maria Regina Tobi dan Farida Idayati, “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Flores Timur”. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. Vol 5 No. 8 agustus (2016), h.8

<sup>65</sup> Ima Amaliah, Aan Julia, dan Westi Riani, *Loc.Cit*

<sup>66</sup> Andri Haryanto, *Op.Cit*, h.29

2. Menghitung data dengan menggunakan rasio efektivitas keuangan daerah, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio desentralisasi fiskal dan *trend* masing-masing rasio.
3. Menginterpretasikan data yang diperoleh dari hasil perhitungan untuk memberikan gambaran yang sebenarnya mengenai kinerja keuangan pemerintah Kota Bandar Lampung.

Metode analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan analisis rasio. Analisis rasio yang digunakan ada tiga yaitu rasio efektivitas, rasio kemandirian dan rasio desentralisasi fiskal.

a. Rasio Efektivitas Keuangan Daerah

Rasio efektivitas keuangan daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.<sup>67</sup> Perhitungan rasio efektivitas keuangan daerah:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100$$

---

<sup>67</sup> Abdul Halim, *Op.Cit*, h.234

**Tabel 3.2**  
**Kriteria Tingkat Efektivitas Keuangan Daerah**

<b>Rasio Efektivitas</b>	<b>Persentase (%)</b>
Sangat Efektif	> 100
Efektif	> 90-100
Cukup Efektif	> 80-90
Kurang Efektif	> 60-80
Tidak Efektif	≤ 60

*Sumber : Depdagri, Kepmendagri tahun 2002*

Selanjutnya analisis *trend* efektivitas keuangan daerah digunakan untuk mengetahui arah perkembangan efektivitas keuangan daerah tersebut. Apabila presentasi *trend* EKD lebih dari 100% maka telah terjadi perkembangan EKD. Semakin besar persentase *trend* EKD dari tahun ke tahun maka arah perkembangan efektivitas keuangan daerah kabupaten/kota semakin baik dan sebaliknya. Perhitungan *trend* efektivitas keuangan daerah:

$$Trend\ EKD = \frac{EKD\ Tahun\ Pembanding}{EKD\ Tahun\ Dasar} \times 100$$

b. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintahan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar



pajak dan retribusi sebagai sumber yang diperlukan oleh daerah.<sup>68</sup>

Perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat}} \times 100$$

**Tabel 3.3**  
**Pola Hubungan Dan Kriteria Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah**

Kemampuan / Ketergantungan Keuangan Daerah	Persentase	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	25% - 50%	Konsultatif
Sedang	50% - 75%	Partisipatif
Tinggi	75% - 100%	Delegatif

*Sumber : Depdagri, Kepmendagri tahun 2002*

Selanjutnya analisis *trend* kemandirian keuangan daerah digunakan untuk mengetahui arah perkembangan kemandirian keuangan daerah tersebut. Apabila persentase *trend* KKD lebih dari 100%, maka telah terjadi perkembangan KKD. Semakin besar persentase *trend* KKD dari tahun ke tahun maka arah perkembangan kemandirian Kabupaten/Kota semakin baik dan sebaliknya. Perhitungan *trend* kemandirian keuangan daerah:

$$\text{Trend KKD} = \frac{\text{KKD Tahun Pembanding}}{\text{KKD Tahun Dasar}} \times 100$$

<sup>68</sup> Abdul Halim, *Op.Cit*, h.232

c. Rasio Desentralisasi Fiskal

Rasio desentralisasi fiskal merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan kewenangan atau tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menggali dan mengelola pendapatan.<sup>69</sup> Perhitungan desentralisasi fiskal:

$$\text{Rasio Desentralisasi} = \frac{\text{Total Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100$$

**Tabel 3.4**  
**Kriteria Tingkat Desentralisasi Fiskal Keuangan Daerah**

Kemampuan keuangan daerah	Desentralisasi %
Sangat kurang	0,00-10,0%
Kurang	10,01-20,00%
Sedang	20,01-30,00%
Cukup	30,01-40,00%
Baik	40,01-50,00%
Sangat baik	>50,00%

*Sumber : Depdagri, Kepmendagri tahun 2002*

Selanjutnya analisis *trend* desentralisasi keuangan daerah digunakan untuk mengetahui arah perkembangan kemampuan pemerintah daerah memaksimalkan tanggung jawab yang diberikan. Semakin besar persentase *trend* desentralisasi dari tahun ke tahun maka arah perkembangan kemampuan pemerintah/kota dalam menggali potensi daerahnya semakin baik dan sebaliknya. Perhitungan *trend* desentralisasi fiskal:

---

<sup>69</sup> Andri Haryanto, *Loc.Cit*

$$Trend\ DKD = \frac{DKD\ Tahun\ Pembanding}{DKD\ Tahun\ Dasar} \times 100$$



## BAB IV

### ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Gambaran Umum Objek Penelitian

###### a. Sejarah Kota Bandar Lampung

Wilayah Kota Bandar Lampung di zaman hindia belanda termasuk wilayah orde afdeling telok betong yang dibentuk dengan Staatsbalat 1912 nomor : 462, terdiri dari Ibu Kota Telok Betong sendiri dan daerah-daerah sekitarnya. Sebelum tahun 1912 Ibukota Telok Betong ini meliputi juga tanjung karang yang terletak 5 KM sebelah utara Kota Telok Betong. Ibukota onder afdeling Telok Betong adalah Tanjung Karang, sedangkan Kota Telok Betong adalah Ibu Kota keresidenan Lampung. Kedua kota tersebut tidak termasuk dalam Marga Verband, melainkan berdiri sendiri yang dikepalai oleh seorang asisten demang yang tunduk kepada Hoof Van Plaatsleyk Bestuur (*kontrolling B.B*) yaitu kepala onder afdeling Telok Betong.

Biaya sehari-hari untuk pemeliharaan kedua kota tersebut ditanggung oleh suatu dana yang disebut Plaatsyk Fonds. Pengelolaan keuangan diatur dalam keputusan residen Lampung Nomor : 169, tanggal 24 november 1930 sejak kemerdekaan Indonesia berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 1948, Kota Tanjung Karang dan Kota Teluk

Betung berstatus kota kecil, yang merupakan bagian dari Kabupaten Lampung Selatan, wilayah sekitarnya dipisahkan dari wilayah onder afdeling telok betong- tanjung karang berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 nama Kota Besar Tanjungkarang- Telokbetong dirubah menjadi Kota Praja Swantantara tingkat 2 Tanjungkarang- Telukbetung yang terdiri dari 2 kecamatan yaitu kecamatan tanjung karang dan kecamatan telok betong, sisa wilayah onder afdeling Telok Betong dimasukkan dalam wilyah Kabupaten Lampung Selatan.

Keresidenan Lampung dinaikkan statusnya menjadi Provinsi Lampung berdasarkan undang-undang nomor : 18 tahun 1965 Kota Praja Tanjungkarang-Telukbetung berubah menjadi Kotamadya Tanjungkarang-Telukbetung. Perbatasan Kotamadya Tanjungkarang-Telukbetung berdasarkan undang-undang darurat nomor: 5 tahun 1956 No. Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 1959, yang terdiri dari 4 kecamatan yaitu:

1. Kecamatan Tanjung Karang Barat dengan pusat pemerintahannya di jalan bukit tinggi bamboo kuning (kampung kaliawi).
2. Kecamatan Tanjung Karang Timur dengan pusat pemerintahannya di Kampong Sawah Lama.
3. Kecamatan Teluk Betung Utara dengan pusat pemerintahannya di Sumur Batu.
4. Kecamatan Teluk Betung Selatan dengan pusat pemerintahannya di jalan mentawai Teluk Betung.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975 dan peraturan pemerintah Nomor 3 Tahun 1982 tentang perubahan batas wilayah Kotamadya dari II Tanjungkarang-Telukbetung, yang mulai berlaku sejak tanggal 8 juni 1982, batas wilayah Kotamadya TK. II Tanjungkarang-Telukbetung diperluas yaitu dengan diserahkannya sebagian wilayah dari II Kabupaten Lampung Selatan yang meliputi 14 desa dari sebagian wilayah Kecamatan Kedaton, dan 14 desa di Kecamatan Panjang oleh Bupati Kepala Daerah TK. II Lampung Selatan kepada Walikota dari II Tanjungkarang- Telukbetung.

Sejak saat itu pula Tanjungkarang-Telukbetung menjadi 9 kecamatan dengan 58 kelurahan. Berdasarkan Surat Gubernur / KDH Tingkat I Lampung Nomor G/ 185.B.III/ HK/ 1988 tanggal 6 Juni 1988, serta Surat Persetujuan Mendagri Nomor 140/1799/PUOD tanggal 19 Mei 1987 tentang pemekaran kelurahan di wilayah Kota Bandar Lampung, maka Kota Bandar Lampung terdiri dari 9 kecamatan dengan 84 kelurahan. Perkembangan selanjutnya berdasarkan peraturan daerah Kota Bandar Lampung No. 4 Tahun 2001 tentang pembentukan penghapusan dan penggabungan kecamatan serta kelurahan di Kota Bandar Lampung, maka Kota Bandar Lampung menjadi 13 kecamatan dengan 98 kelurahan yaitu:

1. Kecamatan Kedaton dengan pusat pemerintahannya berkedudukan di Kampong Baru.
2. Kecamatan Tanjung Karang Timur dengan pusat pemerintahannya berkedudukan di Kota Baru.
3. Kecamatan Tanjung Karang barat dengan pusat pemerintahannya berkedudukan di Gedong Air.
4. Kecamatan Tanjung Karang Pusat dengan pusat pemerintahannya berkedudukan di Palapa.
5. Kecamatan Sukarame dengan pusat pemerintahannya berkedudukan di Sukarame.
6. Kecamatan Telukbetung Utara dengan pusat pemerintahannya berkedudukan di Kupang Kota.
7. Kecamatan Telukbetung Selatan dengan pusat pemerintahannya berkedudukan di Sukaraja.
8. Kecamatan Telukbetung Barat dengan pusat pemerintahannya berkedudukan di Bakung.
9. Kecamatan Panjang dengan pusat pemerintahannya berkedudukan di Panjang Selatan.
10. Kecamatan Kemiling dengan pusat pemerintahannya berkedudukan di Sumberejo.
11. Kecamatan Rajabasa dengan pusat pemerintahannya berkedudukan di Rajabasa.



12. Kecamatan Tanjung Seneng dengan pusat pemerintahannya berkedudukan di Tanjung Seneng.
13. Kecamatan Sukabumi dengan pusat pemerintahannya berkedudukan di Sukabumi.

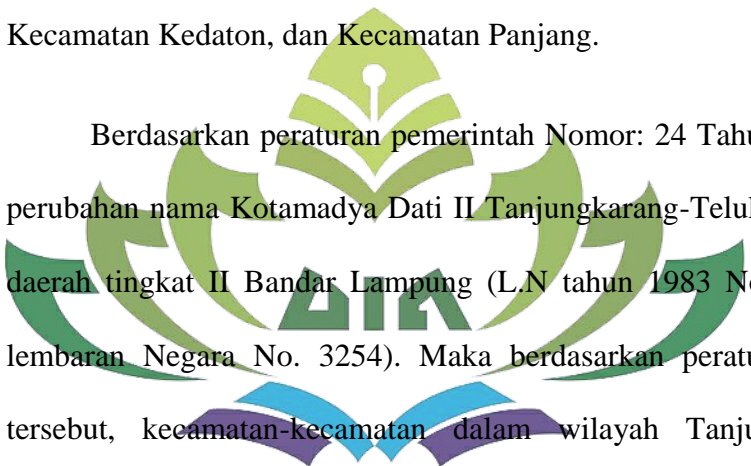
Kotamadya Tanjungkarang-Telukbetung (Bandar Lampung) sebagai Ibukota Provinsi Lampung berdasarkan peraturan daerah kota madya daerah tingkat II tanjung karang – telukbetung (Bandar Lampung) Nomor: 5 tahun 1983 telah ditetapkan hari jadinya pada tanggal 17 juni 1682.

b. Keresidenan Menjadi Provinsi

Setelah keresidenan lampung statusnya menjadi Provinsi Lampung. Berdasarkan Undang-Undang Nomor: 18 Tahun 1965, Kota Praja Tanjung Karang-Telok Betong, berubah menjadu Kotamadya Tanjungkarang-Telukbetung. Perbatasan Kotamadya Tanjung Karang-Teluk Betung, ditentukan dalam Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 Juncto Undang-Undang Nomor 28 tahun 1959, yang terdiri dari 4 kecamatan yaitu:

1. Kecamatan Tanjung Karang Barat.
2. Kecamatan Tanjung Karang Timur.
3. Kecamatan Teluk Betung Utara dan,
4. Kecamatan Teluk Betung Selatan.

Berdasarkan PP. No. 3 Tahun 1982, Tanggal 30 Januari 1982 tentang perubahan batas wilayah Kotamadya Dati II. Tanjungkarang-Telukbetung, mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal 8 Juni 1982, yaitu sejak diserahkan oleh bupati kepala daerah tingkat II Lampung Selatan kepada Walikotamadya kepala daerah tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung diperluas, yaitu dengan dimasukkannya sebagian wilayah daerah tingkat II Kabupaten Lampung Selatan yaitu sebagian wilayah Kecamatan Kedaton, dan Kecamatan Panjang.



Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor: 24 Tahun 1983, tentang perubahan nama Kotamadya Dati II Tanjungkarang-Telukbetung menjadi daerah tingkat II Bandar Lampung (L.N tahun 1983 No. 30, tambahan lembaran Negara No. 3254). Maka berdasarkan peraturan pemerintah tersebut, kecamatan-kecamatan dalam wilayah Tanjungkarang-Teluk Betung, menjadi 9 kecamatan. dan pada tahun 1983 nama Kotamadya Dati II Tanjungkarang-Telukbetung berubah menjadi Kotamadya Dati II Bandar Lampung.

Berdasarkan peraturan daerah Kota Bandar Lampung Nomor 04 Tahun 2001, tanggal 3 Oktober 2001, tentang pembentukan, penghapusan dan penggabungan kecamatan dan kelurahan, maka Kota Bandar Lampung berubah menjadi 13 kecamatan dengan 98 kelurahan dan terakhir dimekarkan kembali menjadi 20 kecamatan dan 126 kelurahan

berdasarkan peraturan daerah Kota Bandar Lampung No. 4 tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah no. 12 tahun 2012.

c. Hari Jadi Kota Bandar Lampung

Penetapan hari jadi Kota Bandar Lampung, telah diadakan penelitian oleh team penggali hari jadi Kotamadya Tanjungkarang-Telukbetung yang dibentuk dengan keputusan Walikotamadya kepala daerah tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung tanggal 15 desember 1981 nomor: 234/BG.II/HK/1981.


Berdasarkan laporan residen banten William Craft kepada Gubernur Jendral Cornelis yang didasarkan pada keterangan Pangeran Aria Dipati Ningrat (Duta Kesultanan) yang disampaikan kepadanya tanggal 17 juni 1982 antara lain berisikan: “Lampung Telok Betong ditepi laut adalah tempat kedudukan seorang dipati tumenggung nata Negara membawahi 3.000 orang” (Deghregistor yang dibuat dan dipelihara oleh pimpinan VOC halaman 777 dan seterusnya).

Dasar pertimbangan ditetapkan tanggal/hari jadi Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

1. Secara otentik, tanggal, bulan dan tahun tersebut dapat dipertanggung jawabkan.

2. Berdaarkan data-data yang ada dan keterangan-keterangan yang juga dapat dipertanggung jawabkan.
3. Tanggal dan bulan tersebut merupakan pengakuan dari pihak luar bahwa ditelukbetung sudah ada pemerintahan yang berkedudukan di Telukbetung.
4. Tanggal 17 merupakan angka keramat bagi bangsa Indonesia, sebagai tanggal lahirnya Negara kesatuan republic Indonesia.

d. Geografi Kota Bandar Lampung



Secara geografis Kota Bandar Lampung terletak pada kedudukan  $5^{\circ}20'$  sampai dengan  $5^{\circ}30'$  lintang selatan dan  $105^{\circ}28'$  sampai dengan  $105^{\circ}37'$  bujur timur. Letak tersebut berada diteluk lampung dibagian selatan provinsi lampung dan diujung selatan pulau sumatera, yang memiliki luas wilayah 197,22 km<sup>2</sup> dengan batas wilayah sebagai berikut:

- 1.) Disebelah utara berbatasan dengan kecamatan natar dan kecamatan jati agung kabupaten lampung selatan.
- 2.) Disebelah selatan berbatasan dengan teluk lampung.
- 3.) Disebelah barat berbatasan dengan kecamatan gedung tataan dan teluk pandan padang cermin Kabupaten Pesawaran.
- 4.) Disebelah timur berbatasan dengan kecamatan tanjung bintang, kecamatan merbau mataram dan kecamatan katibung kabupaten Lampung Selatan.

e. Topografi Kota Bandar Lampung

Kota Bandar Lampung sebagian besar terletak pada ketinggian 0 sampai 700 meter di atas permukaan laut dengan topografi yang terdiri dari:

- 1.) Daerah pantai yaitu sekitar telukbetung dan panjang.
- 2.) Daerah perbukitan yaitu sekitar telukbetung bagian utara.
- 3.) Daerah dataran tinggi serta sedikit bergelombang terdapat di tanjung karang bagian barat digunung balau dan perbukitab batu serampok.
- 4.) Teluk lampung dan pulau-pulau kecil bagian selatan.

Dataran Kota Bandar Lampung sebagian besar dialiri beberapa sungai yang dimanfaatkan untuk pengairan lokasi pertanian. Umumnya sungai-sungai di Kota Bandar Lampung dengan panjang, antara 2 sampai 14 Km. dan hulu sungai berada pada bagian barat sedangkan daerah hilir pada bagian selatan yaitu pada dataran rendah/pantai.

Selain itu wilayah Kota Bandar Lampung sebagian besar merupakan perbukitan, diantaranya yaitu: Gunung Kunyit, Gunung Bakung, Gunung Sula, Gunung Celigi, Gunung Perahu, Gunung Cerepung, Gunung Sari, Gunung Palu, Gunung Depok, Gunung Kucing, Gunung Banten, Gunung Sukajawa, Bukit Serampok, Jaha Dan Lereng. Bukit Asam, Bukit Pidada, Bukit Balau, Gugusan Bukit Hata, Bukit Cipagoh, Bukit Kaliawi, Bukit Palapa I, Bukit Palapa II, Bukit Pasir

Gintung, Bukit Kaki Gunung Betung, Bukit Sukadana Ham, Bukit Susunan Baru, Bukit Suka Menanti, Bukit Melutum, Bukit Randu, Bukit Langgar, Bukit Camang Timur Dan Bukit Camang Barat.

f. Kondisi Demografi Kota Bandar Lampung

Penduduk Kota Bandar Lampung terdiri dari berbagai suku bangsa (heterogen), berdasarkan data yang terdapat pada dinas kependudukan dan catatan sipil Kota Bandar Lampung, jumlah penduduk hingga tahun 2016 adalah 1.251.642 jiwa, dengan rincian berdasarkan pada tiap kecamatan dapat dilihat di tabel:



**Tabel 4.1**  
**Jumlah Penduduk Kota Bandar Lampung**  
**Perkecamatan pada Tahun 2016**

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk
1.	Kedaton	72.953 jiwa
2.	Sukarame	73.443 jiwa
3.	Tanjung Karang Barat	74.157 jiwa
4.	Tanjung Karang Pusat	72.195 jiwa
5.	Tanjung Karang Timur	56.248 jiwa
6.	Teluk Betung Utara	62.611 jiwa
7.	Teluk Betung Barat	35.951 jiwa
8.	Teluk Betung Selatan	49.916 jiwa
9.	Teluk Betung Timur	52.765 jiwa
10.	Bumi Waras	68.030 jiwa
11.	Kedamaian	49.840 jiwa
12.	Enggal	40.660 jiwa
13.	Langkapura	29.024 jiwa
14.	Panjang	96.287 jiwa
15.	Kemiling	81.112 jiwa
16.	Rajabasa	81.122 jiwa
17.	Labuhan Ratu	60.692 jiwa
18.	Sukabumi	69.621 jiwa
19.	Tanjung Senang	54.873 jiwa
20.	Way Halim	92.163 jiwa
<b>Jumlah</b>		<b>1.251.642 jiwa</b>

*Sumber : Selayang Pandang Kota Bandar Lampung Tahun 2017*

g. Perekonomian Kota Bandar Lampung

Secara umum perekonomian Kota Bandar Lampung kini digerakkan oleh usaha mikro serta sektorniaga dan jasa. Selain itu, program Kota Bandar Lampung yang bekerjasama dengan perguruan tinggi dalam membina mahasiswa secara efektif berkontribusi dalam pembangunan daerah. Saat ini pengusaha-pengusaha muda baru marak mendirikan usaha kuliner yang berampak pada pembangunan sector



pariwisata daerah. Strategi yang di ambil oleh pengusaha kuliner adalah menduplikasikan kuliner daerah lain kemudian memodifikasinya menjadi orisinil. Pembangunan usaha kuliner ini juga memanfaatkan momentum maraknya pembangunan hotel berbintang di Bandar Lampung. Kendati telah memiliki banyak hotel, sejumlah hotel internasional berekspansi ke Bandar Lampung.

h. Visi dan Misi

1) Visi

Bandar Lampung sehat, cerdas, beriman, berbudaya, unggul dan berdaya saing berbasis ekonomi kerakyatan.

2) Misi

- a) Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.
- b) Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan masyarakat.
- c) Meningkatkan daya dukung infrastruktur dalam skala mantap untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial.
- d) Mengembangkan dan memperkuat ekonomi daerah dengan berlandaskan pada ekonomi kerakyatan.
- e) Mengembangkan masyarakat agamis, berbudaya, dan mengembangkan budaya daerah.

- f) Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih, serta berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha.<sup>70</sup>

## B. Analisis Data

### 1. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan data-data yang diperoleh berdasarkan metode sampel yang digunakan yaitu *purposive sampling*. Data-data yang diperlukan dalam analisis ini diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Keseluruhan data yang diperoleh adalah APBD Kota Bandar Lampung tahun 2008-2017 yang terdiri dari target dan realisasi pendapatan asli daerah, pendapatan daerah, dan dana berimbang.

Berdasarkan data yang diperoleh diharapkan dapat diketahui bagaimana kinerja keuangan daerah khususnya di Kota Bandar Lampung tahun 2008-2017 berdasarkan 3 rasio yaitu rasio efektivitas, rasio kemandirian dan rasio desentralisasi fiskal. Dengan analisis rasio keuangan pemerintah daerah dapat menilai kemandirian keuangan daerah, mengukur efektivitas keuangan daerah, dalam merealisasikan pendapatan asli daerah, dan dapat mengukur masing masing sumber pendapatan dalam membentuk pendapatan daerah.

---

<sup>70</sup> Humas sekretariat Kota Bandar Lampung, *selayang pandang Kota Bandar Lampung*, (Bandar Lampung: Pemerintah Kota Bandar Lampung, 2017), h.1

## 2. Analisis Rasio

### a. Rasio Efektivitas Keuangan Daerah

Rasio efektivitas dapat dihitung dengan cara membandingkan antara realisasi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) dengan target penerimaan pendapatan asli daerah (PAD). Berdasarkan rasio efektivitas keuangan daerah pemerintah Kota Bandar Lampung pada tahun 2008-2017 dapat dilihat pada tabel 4.2 :

**Tabel 4.2**  
**Rasio Efektivitas Keuangan Daerah Kota Bandar Lampung**  
**Tahun 2008-2017**

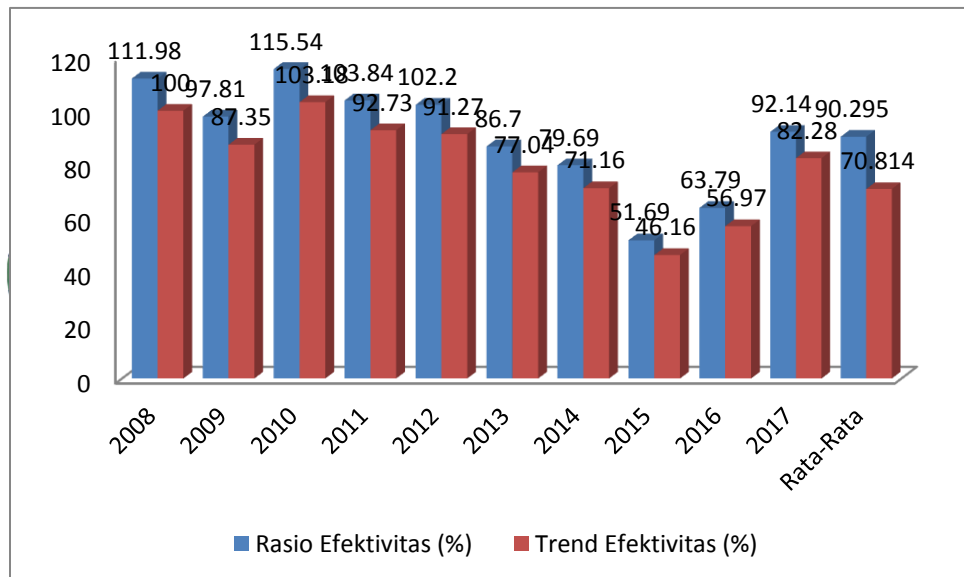
<b>Tahun</b>	<b>Target (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>Rasio Efektivitas (%)</b>	<b>Trend Efektivitas (%)</b>
2008	60.422.775.028,70	67.661.519.021,92	111,98	100
2009	72.009.309.841,70	70.432.260.003,19	97,81	87,35
2010	75.031.991.782,16	86.692.399.700,41	115,54	103,18
2011	156.796.491.183,50	162.818.119.556,88	103,84	92,73
2012	292.272.049.972,25	298.696.062.085,49	102,20	91,27
2013	418.111.740.815,52	360.698.350.131,88	86,27	77,04
2014	495.200.463.391,26	394.646.889.446,59	79,69	71,16
2015	769.108.142.606,24	397.547.326.856,39	51,69	46,16
2016	757.745.187.987,05	483.379.398.034,84	63,79	56,97
2017	994.795.696.600,00	612.809.680.623,87	92,14	82,28
<b>Rata-rata</b>	<b>409.149.384.920,84</b>	<b>293.538.200.546,15</b>	<b>90,495</b>	<b>70,814</b>

*Sumber: Data Diolah Tahun 2018*

Berdasarkan tabel 4.2 di pada tahun 2010 merupakan yang tertinggi selama tahun 2008-2017 karena rasio efektivitas keuangan daerah yang dicapai melebihi 100 persen atau sebesar 115,54 persen sebagaimana berdasarkan kriteria kinerja keuangan efektivitas keuangan daerah dimana lebih dari 100 persen merupakan kriteria sangat efektif.

Pada tahun 2015 kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang telah di anggarkan tidak efektif dan merupakan yang terendah selama tahun 2008-2017 karena rasio efektivitas keuangan daerah kurang dari 60 persen atau sebesar 51,69 persen.

Dari tabel 4.2 di atas dapat dibuat gambar efektivitas keuangan daerah sebagaimana dilihat pada gambar 4.1 berikut:



**Gambar 4.1**  
**Rasio Efektivitas dan *Trend* Efektivitas**

Dilihat dari data di atas menggambarkan bahwa rasio efektivitas keuangan daerah mengalami peningkatan dan penurunan. secara rata-rata rasio efektivitas selama tahun 2008-2017 merupakan kriteria efektif dengan persentase sebesar 90,495 persen sebagaimana berdasarkan kriteria kinerja keuangan efektivitas keuangan daerah dimana 90-100

persen dalam kriteria efektif. Kemudian untuk melihat perkembangan efektivitas keuangan daerah tahun 2008-2017 diukur menggunakan *trend* dengan tahun 2008 sebagai tahun dasar.

*Trend* efektivitas keuangan daerah tahun 2008-2017 mengalami banyak penurunan dengan rata-rata *trend* efektivitas sebesar 70,814 persen. tahun 2010 merupakan persentase tertinggi karena *trend* efektivitas keuangan daerah mencapai lebih dari 100 persen atau sebesar 103,18 persen. Dan pada tahun 2015 merupakan persentase terendah sebesar 46,16 persen menunjukkan perkembangan efektivitas keuangan daerah yang menurun atau kurang baik.

b. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian dapat dihitung dengan cara membandingkan antara realisasi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) dengan target bantuan pemerintah pusat. Berdasarkan rasio kemandirian keuangan daerah pemerintah Kota Bandar Lampung pada tahun 2008-2017 dapat dilihat pada tabel 4.3 :

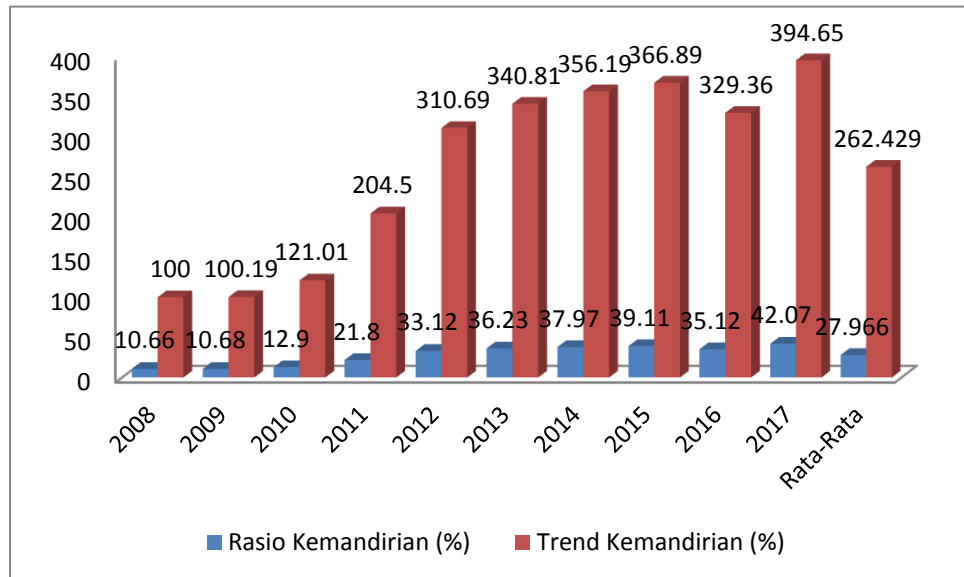
**Tabel 4.3**  
**Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kota Bandar Lampung**  
**Tahun 2008-2017**

<b>Tahun</b>	<b>PAD (Rp)</b>	<b>Pendapatan Transfer (Rp)</b>	<b>Rasio Kemandirian (%)</b>	<b>Trend Kemandirian (%)</b>
2008	67.661.519.021,92	634.760.315.000,46	10,66	100
2009	70.432.260.003,19	659.733.381.000,20	10,68	100,19
2010	86.692.399.700,41	672.078.484.000,49	12,90	121,01
2011	162.818.119.556,88	747.009.425.171,00	21,80	204,50
2012	298.696.062.085,49	901.841.182.094,00	33,12	310,69
2013	360.698.350.131,88	992.894.943.895,00	36,23	340,81
2014	394.646.889.446,59	1.039.433.426.630,00	37,97	356,19
2015	397.547.326.856,39	1.016.422.749.268,00	39,11	366,89
2016	483.379.398.034,84	1.376.175.794.387,00	35,12	329,36
2017	612.809.680.623,87	1.456.610.360.061,45	42,07	394,65
<b>Rata-Rata</b>	<b>293.538.200.546,15</b>	<b>949.696.006.150,76</b>	<b>27,966</b>	<b>262,429</b>

*Sumber : Data Diolah Tahun 2018*

Berdasarkan tabel 4.3 di atas diketahui bahwa pada tahun 2008-2017 menunjukkan persentase tingkat kemandirian yang terus meningkat kecuali pada tahun 2016 mengalami penurunan. Rasio kemandirian tertinggi yaitu pada tahun 2017 dikategorikan masih rendah dengan persentase sebesar 42,07 persen sebagaimana berdasarkan kriteria kinerja keuangan efektivitas keuangan daerah dimana 25-50 persen merupakan kriteria rendah. Sedangkan tingkat kemandirian terendah yaitu pada tahun 2008 sebesar 10,66 persen menurut kriteria tingkat kemandirian keuangan daerah 0-25 persen merupakan kriteria tingkat kemandirian sangat rendah.

Dari tabel di atas dapat dibuat gambar rasio tingkat kemandirian keuangan daerah sebagai berikut:



**Gambar 4.2**  
**Rasio Kemandirian dan *Trend* Kemandirian**

Dari data di atas terlihat rata-rata kemandirian keuangan daerah Kota Bandar Lampung pada tahun 2008-2017 sebesar 27,966 persen dikategorikan rendah sebagaimana berdasarkan kriteria kinerja keuangan efektivitas keuangan daerah dimana 25-50 persen merupakan kriteria rendah. Untuk melihat perkembangan kemandirian keuangan daerah dengan *trend* kemandirian keuangan daerah. Pada tahun 2017 Merupakan *trend* kemandirian tertinggi sebesar 394,65 persen, dengan demikian kemandirian keuangan daerah pada tahun 2008-2017 menunjukkan perkembangan yang terus meningkat dan semakin baik.

#### c. Rasio Desentralisasi Fiskal Keuangan Daerah

Rasio Desentralisasi Fiskal dapat dihitung dengan cara membandingkan antara total pendapatan asli daerah (PAD) dengan total



pendapatan daerah. Berdasarkan rasio desentralisasi fiskal keuangan daerah pemerintah Kota Bandar Lampung pada tahun 2008-2017 dapat dilihat pada tabel 4.4 :

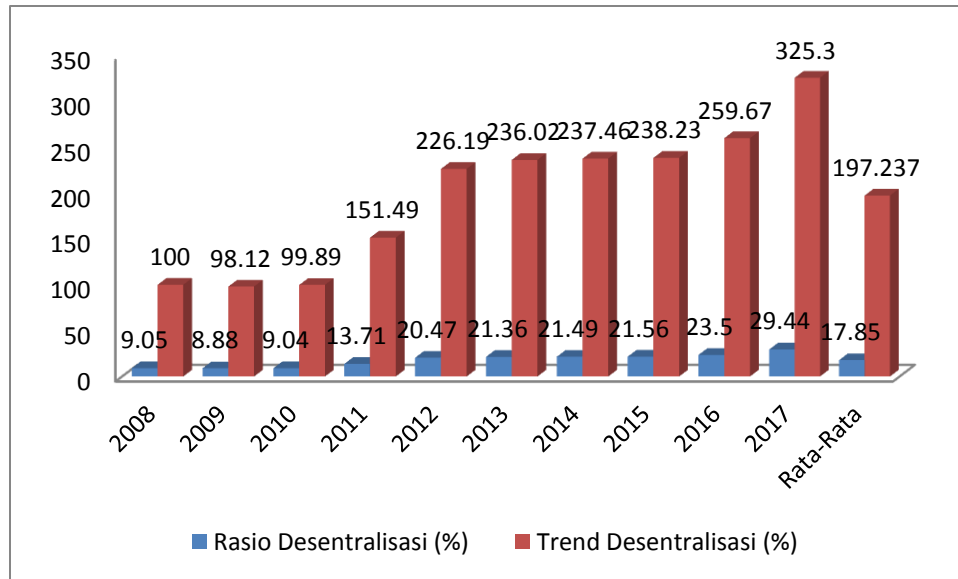
**Tabel 4.4**  
**Rasio Desentralisasi Keuangan Daerah Kota Bandar Lampung**  
**Tahun 2008-2017**

<b>Tahun</b>	<b>PAD (Rp)</b>	<b>Total Pendapatan Daerah (Rp)</b>	<b>Rasio Desentralisasi Fiskal (%)</b>	<b>Trend Desentralisasi Fiskal(%)</b>
2008	67.661.519.021,92	747.982.275.000,50	9,05	100
2009	70.432.260.003,19	793.493.023.000,29	8,88	98,12
2010	86.692.399.700,41	959.069.382.000,31	9,04	99,89
2011	162.818.119.556,88	1.187.871.504.156,20	13,71	151,49
2012	298.696.062.085,49	1.459.471.856.318,18	20,47	226,19
2013	360.698.350.131,88	1.688.412.290.739,88	21,36	236,02
2014	394.646.889.446,59	1.836.004.647.114,59	21,49	237,46
2015	397.547.326.856,39	1.843.540.674.593,39	21,56	238,23
2016	483.379.398.034,84	2.057.086.652.010,39	23,50	259,67
2017	612.809.680.623,87	2.081.420.040.685,32	29,44	325,30
<b>Rata-Rata</b>	<b>293.538.200.546,15</b>	<b>1.465.435.234.561,91</b>	<b>17,85</b>	<b>197,237</b>

*Sumber : Data Diolah Tahun 2018*

Berdasarkan tabel 4.4 diatas diketahui bahwa rasio desentralisasi fiskal Kota Bandar Lampung tertinggi pada tahun 2017 dengan tingkat persentase mencapai 29,44 persen. Bila dilihat berdasarkan kriteria desentralisasi fiskal, pada tahun 2017 berada pada persentase diatas 25 persen dikategorikan sedang. Sedangkan tahun 2009 merupakan persentase desentralisasi fiskal terendah dengan persentase sebesar 8,88 dikategorikan sangat kurang.

Dari tabel 4.4 diatas dapat dibuat gambar rasio tingkat desentralisasi keuangan daerah sebagai berikut:



**Gambar 4.3**  
**Rasio Desentralisasi dan *Trend* Desentralisasi**

Dari data di atas terlihat rata-rata desentralisasi fiskal daerah Kota Bandar Lampung pada tahun 2008-2017 sebesar 17,8 persen dikategorikan kurang baik sebagaimana berdasarkan kriteria desentralisasi fiskal keuangan daerah dimana dibawah 20,00 persen merupakan kriteria kurang baik. Untuk melihat perkembangan desentralisasi fiskal Kota Bandar Lampung secara *trend* menunjukkan kecenderungan terus meningkat dengan persentase tertinggi pada tahun 2017 sebesar 325,30 persen. Demikian desentralisasi fiskal pada tahun 2008-2017 menunjukkan pertumbuhan yang terus meningkat dan semakin baik.

## C. Pembahasan

### 1. Kinerja Keuangan Daerah Kota Bandar Lampung Berdasarkan Rasio Efektivitas Keuangan Daerah

Rasio efektivitas keuangan daerah diperoleh dengan membandingkan antara realisasi pendapatan asli daerah dengan target pendapatan asli daerah. Hasil perhitungan rasio efektivitas keuangan daerah dapat dilihat pada lampiran 1. Rasio efektivitas keuangan daerah pada tahun 2008 sebesar 111,98 persen merupakan kriteria sangat efektif. kemudian mengalami penurunan pada lain-lain pendapatan asli daerah tahun 2009 sehingga hasil perhitungan rasio efektivitas menjadi 97,82 persen dikategorikan efektif menurut kriteria pengukuran karena berada pada tingkat rasio di bawah 100 persen.

Akan tetapi pada tahun 2010 rasio efektivitas keuangan daerah mengalami kenaikan pada pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sehingga hasil perhitungan rasio efektivitas menjadi 115,54 persen masuk dalam kategori sangat efektif dan merupakan rasio efektivitas tertinggi selama periode tahun 2008-2017. Hal ini berarti kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan pendapatan sesuai dengan yang ditargetkan mengalami peningkatan dan penurunan. Selanjutnya pada tahun 2011 sampai 2015 kembali mengalami penurunan.

Pada tahun 2011 dan 2012 mengalami peningkatan pada pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah tetapi jika dilihat dari hasil perhitungan rasio efektivitas pada tabel 4.2 mengalami penurunan menjadi 103,54 persen dikategorikan sangat efektif dan tahun 2012 menjadi 102,20 persen dikategorikan sangat efektif karena target pendapatan asli daerah setiap tahunnya juga ikut meningkat. Pada tahun 2013 mengalami penurunan pada retribusi daerah sehingga hasil perhitungan rasio efektivitas menjadi 86,27 persen dikategorikan cukup efektif. Pada tahun 2014 mengalami penurunan pada retribusi daerah sehingga hasil perhitungan rasio efektivitas menjadi 79,69 persen dikategorikan kurang efektif.

Pada tahun 2015 mengalami penurunan pada hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sehingga hasil perhitungan rasio efektivitas menjadi 51,69 persen dikategorikan tidak efektif dan pada tahun 2015 merupakan rasio efektivitas keuangan daerah paling terendah selama periode tahun 2008-2017. Pada tahun 2016 dan 2017 kembali mengalami kenaikan yaitu pada tahun 2016 mengalami kenaikan pada pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sehingga hasil perhitungan rasio efektivitas menjadi 63,79 persen dikategorikan kurang efektif dan pada tahun 2017 mengalami kenaikan pada pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang sah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sehingga hasil

perhitungan rasio efektivitas menjadi 92,14 persen berada pada kemampuan kurang efektif dan efektif berdasarkan kriteria tingkat kemampuan efektivitas keuangan daerah.

Kemudian dilihat dari pencapaian target pendapatan asli daerah di Kota Bandar Lampung pada tahun 2008, 2010, 2011, dan 2012 sudah mencapai target yang telah ditentukan. Sedangkan pada tahun 2009, 2013, 2014, 2015, 2016, dan 2017 pendapatan asli daerah di Kota Bandar Lampung tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Berdasarkan penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa rasio efektivitas keuangan daerah Kota Bandar Lampung cenderung mengalami penurunan. Secara rata-rata tahun 2008 sampai dengan tahun 2017 efektivitas keuangan daerah Kota Bandar Lampung sebesar 90,495 yang berada pada kategori efektif yang berarti kemampuan daerah Kota Bandar Lampung dalam menjalankan tugasnya termasuk baik.

Pemerintah Kota Bandar Lampung sudah berupaya menerapkan potensi yang sebenarnya tetapi masih banyak kendala sehingga tidak mencapai target yang telah ditentukan seperti dalam hal pemungutan pajaknya yang mempengaruhi pendapatan asli daerah di Kota Bandar Lampung yaitu kemampuan sumber daya manusia yang masih kurang, sarana prasarana yang belum maksimal, tingkat kesadaran dari wajib pajak masih sangat kurang, masih kurang maksimalnya sanksi bagi wajib pajak yang belum melakukan pembayaran pajak dalam bentuk sanksi administrasi maupun sanksi pidana

sesuai dengan peraturan pada Undang-Undang 28 dan dilihat dari kondisi ekonomi di Kota Bandar Lampung, daya beli masyarakatnya juga ikut mempengaruhi. Jika daya beli masyarakat naik pendapatan restoran hotel atau bisnis lainnya akan ikut naik sehingga mereka bisa membayar pajaknya.

Dilihat dari *trend* efektivitas keuangan daerah Kota Bandar Lampung selama periode tahun 2008-2017 menunjukkan perkembangan yang kurang baik dengan tahun dasar yaitu tahun 2008 sebesar 100 persen. Pada tahun 2009 mengalami penurunan menjadi 87,35 persen sedangkan pada tahun 2010 mengalami kenaikan menjadi 103,18 persen dan termasuk *trend* rasio kemandirian keuangan daerah tertinggi selama periode tahun 2008-2017. Selanjutnya pada tahun 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, dan 2016 mengalami penurunan secara terus menerus yaitu pada tahun 2011 sebesar 92,73 persen pada tahun 2012 sebesar 91,27 persen.

Pada tahun 2013 sebesar 77,04 persen, pada tahun 2014 sebesar 71,16 persen, pada tahun 2015 sebesar 46,16 persen dan pada tahun 2016 sebesar 56,97 persen. Pada tahun 2017 mengalami kenaikan menjadi 82,28. Kemudian jika dilihat secara rata-rata selama tahun 2008-2017 *trend* efektivitas keuangan daerah hanya sebesar 70,814 persen dikatakan bahwa kemampuan efektivitas keuangan daerah Kota Bandar Lampung selama periode 2008-2017 tidak mengalami perkembangan karena rata-rata *trend* efektivitas keuangan daerah tidak mencapai 100 persen.

Penelitian ini sama hasilnya dengan landasan teori yaitu semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah semakin baik. Penelitian ini juga sesuai dengan penelitian-penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dori Saputra pada tahun 2014 yang berjudul “Analisis kemandirian dan efektivitas keuangan daerah pada kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat”. Dalam penelitian Dori Saputra dimana penelitian tersebut mengukur tentang efektivitas keuangan daerah dari tahun 2004-2011 yang memperoleh rata-rata sebesar 109,8 persen yang menandakan berada pada kategori sangat efektif dengan *trend* efektivitas sebesar 116,02 persen yang menandakan cenderung berkembang dari tahun ke tahun karena persentase lebih dari 100 persen.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Oesi Agustuna pada tahun 2013 yang berjudul “Analisis kinerja pengelolaan keuangan daerah dan tingkat kemandirian daerah di era otonomi daerah: studi kasus Kota Malang tahun anggaran 2007-2011”. Dalam penelitian Oesi Agustuna dimana penelitian tersebut mengukur tentang efektivitas keuangan daerah dari tahun 2007-2011 yang memperoleh rata-rata sebesar 105,4 persen yang berarti pemungutan pendapatan asli daerah cenderung stabil atau sangat efektif. Hal ini juga sejalan dengan penelitian Andry Haryanto pada tahun 2014 yang berjudul “Analisis efektivitas, kemandirian, dan desentralisasi pemerintah Kota Medan”.

Dalam penelitian Andry Haryanto dimana penelitian tersebut mengukur tentang efektivitas keuangan daerah dari tahun 2009-2013 yang memperoleh rata-rata sebesar 87,96 persen yang berada pada kategori cukup efektif dengan *trend* efektivitas keuangan daerah Kota Medan sebesar 72,74 persen yang berarti tidak mengalami perkembangan karena tidak mencapai 100 persen. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Ririn Dwi Anggraini pada tahun 2015 yang berjudul “Analisis kemampuan daerah, tingkat kemandirian dan efektivitas realisasi anggaran pemerintah Kota Tangerang tahun anggaran 2010-2014”.

Dalam penelitian Ririn Dwi Anggraini dimana penelitian tersebut mengukur tentang efektivitas keuangan daerah dari tahun 2010-2014 yang memperoleh rata-rata sebesar 120,32 persen berada pada kategori efektif yang artinya Kota Tangerang telah mampu merealisasikan pendapatan asli daerah sesuai dengan yang telah ditargetkan, bahkan dapat melebihi target. Peningkatan perolehan pendapatan asli daerah ini juga didukung dengan perolehan hasil pajak daerah yang setiap tahun mengalami peningkatan. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Cheris Enjelita Kaunang, Amran T. Naukoko dan Albert T. Londa pada tahun 2016 yang berjudul “Analisis kinerja pengelolaan keuangan daerah dan tingkat kemandirian daerah di era otonomi daerah: studi pada Kota Manado tahun 2010-2014”.

Dalam penelitian Cheris Enjelita Kaunang, Amran T. Naukoko dan Albert T. Londa efektivitas dimana penelitian tersebut mengukur tentang



efektivitas keuangan daerah dari tahun 2010-2014 yang memperoleh rata-rata sebesar 106,95 persen dikategorikan sangat baik. Jadi berdasarkan penelitian terdahulu, efektivitas keuangan daerah Kota Bandar Lampung hanya sebesar 90,495 persen lebih kecil dibandingkan dengan efektivitas keuangan daerah di Kota Malang, Kota Tangerang, Kota Manado, dan Kabupaten atau Kota di Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan *trend* efektivitas keuangan daerah Kota Bandar Lampung hanya sebesar 70,814 persen lebih kecil dibandingkan dengan *trend* efektivitas keuangan daerah di Kota Medan dan Kabupaten atau Kota di Provinsi Sumatera Barat.

## **2. Kinerja Keuangan Daerah Kota Bandar Lampung Berdasarkan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah**

Rasio kemandirian keuangan daerah diperoleh dengan membandingkan antara pendapatan asli daerah dengan bantuan pemerintah pusat. Hasil perhitungan pada lampiran 1 menunjukkan bahwa rasio kemandirian Kota Bandar Lampung pada tahun 2008-2017 terus mengalami peningkatan kecuali pada tahun 2016 mengalami penurunan dan meningkat kembali pada tahun 2017. Pada tahun 2008 kemampuan kemandirian keuangan daerah sebesar 10,66 persen dikategorikan rendah sekali dan termasuk rasio kemandirian keuangan daerah Kota Bandar Lampung yang terendah selama periode tahun 2008-2017.

Pada tahun 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2009 mengalami peningkatan pada pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah diikuti dengan dana berimbang yang juga mengalami peningkatan yaitu pada dana bagi hasil pajak dan bukan pajak, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus sehingga hasil rasio kemandirian menjadi 10,68 persen dikategorikan rendah sekali. Pada tahun 2010 mengalami peningkatan pada retribusi daerah, pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah tetapi diikuti dengan dana berimbang yang juga mengalami peningkatan yaitu pada dana bagi hasil pajak dan bukan pajak, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus sehingga hasil perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah menjadi 12,90 persen dikategorikan rendah sekali.

Pada tahun 2011 mengalami peningkatan pada pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah tetapi diikuti dengan dana berimbang yang juga mengalami peningkatan yaitu pada dana alokasi khusus, dan dana alokasi umum sehingga hasil perhitungan rasio kemandirian menjadi 21,80 persen dikategorikan rendah sekali, Pada tahun 2012 mengalami peningkatan pada pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah tetapi diikuti dengan dana berimbang yang juga mengalami peningkatan yaitu pada dana bagi hasil pajak

dan bukan pajak, dana alokasi khusus, dan dana alokasi umum sehingga hasil perhitungan rasio kemandirian menjadi 31,12 persen dikategorikan rendah.

Pada tahun 2013 mengalami peningkatan pada pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah tetapi diikuti dengan dana berimbang yang juga mengalami peningkatan yaitu pada dana alokasi umum dan dana alokasi khusus sehingga hasil perhitungan rasio kemandirian pada tahun 2013 menjadi 36,33 persen dikategorikan rendah. Pada tahun 2014 mengalami peningkatan pada pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah tetapi diikuti dengan dana berimbang yang juga mengalami peningkatan pada dana bagi hasil pajak dan bukan pajak dan dana alokasi umum sehingga hasil perhitungan rasio kemandirian tahun 2014 menjadi 37,97 persen dikategorikan rendah.

Pada tahun 2015 mengalami peningkatan pada pajak daerah dan retribusi daerah diikuti dengan dana berimbang yang juga mengalami peningkatan pada dana alokasi umum sehingga hasil perhitungan rasio kemandirian tahun 2015 sebesar 39,11 persen dikategorikan rendah. Meskipun rasio kemandirian keuangan daerah Kota Bandar Lampung terus mengalami kenaikan pada tahun 2008-2015, namun belum menunjukkan kemandirian yang semakin baik karena masih dalam kategori rendah. Selanjutnya pada tahun 2016 mengalami penurunan pada hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan tidak diikuti dengan penurunan dana

berimbang sehingga hasil perhitungan rasio kemandirian tahun 2016 menjadi 35,12 persen dikategorikan rendah.

Pada tahun 2017 mengalami kenaikan pada dana bagi hasil pajak dan bukan pajak dan dana alokasi khusus sehingga hasil perhitungan rasio kemandirian pada tahun 2017 menjadi 42,07 persen dikategorikan rendah dan termasuk rasio kemandirian keuangan daerah Kota Bandar Lampung yang tertinggi selama periode tahun 2008-2017. Secara rata-rata kemampuan kemandirian keuangan daerah Kota Bandar Lampung masih rendah dengan persentase sebesar 27,966 persen. Dilihat dari tabel 4.2 bahwa pendapatan asli daerah Kota Bandar Lampung semakin meningkat setiap tahunnya tetapi diikuti dengan dana berimbang atau transferan dari pemerintah pusat yang semakin meningkat juga setiap tahunnya sehingga Kota Bandar Lampung masih belum mandiri untuk membiayai sendiri segala kegiatan pemerintahannya.

Selain itu dapat diartikan bahwa tidak ada peningkatan secara signifikan dalam hal partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah, seperti dalam hal pembayaran pajak dan retribusi. Besarnya penerimaan pajak dan retribusi daerah sebenarnya menunjukkan pemerintah daerah mengandalkan penerimaan pajak sebagai sumber penerimaan PAD, yang nantinya digunakan untuk membiayai pembangunan daerah. Penerimaan yang tinggi dari pajak dan retribusi daerah menunjukkan pemerintah daerah yakin

dapat menggali potensi daerah dengan maksimal sehingga pendapatan pemerintah daerah yang berupa pajak akan meningkat.

Namun jika dilihat dari pajak dan retribusi daerah yang masih rendah dan dana barimbang yang semakin meningkat dari tahun ke tahun menunjukkan pemerintah Kota Bandar Lampung kurang yakin dapat menggali potensi daerahnya sehingga pendapatan asli daerah yang di anggarakan masih rendah. Dilihat dari *trend* kemandirian keuangan daerah Kota Bandar Lampung selama periode tahun 2008-2017 menunjukan perkembangan yang semakin baik dengan tahun dasar yaitu tahun 2008 sebesar 100 persen. Pada tahun 2009 sampai tahun 2015 terus mengalami kenaikan yaitu pada tahun 2009 sebesar 100,19 persen , pada tahun 2010 sebesar 121,01 persen, pada tahun 2011 sebesar 204,50 persen, pada tahun 2012 sebesar 310,69 persen, pada tahun 2013 sebesar 340,81 persen, pada tahun 2014 sebesar 356,19 persen, dan pada tahun 2015 sebesar 466,89 persen.

Selanjutnya pada tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 329,36 persen. Pada tahun 2017 kembali mengalami kenaikan menjadi 394,65 persen dan *trend* rasio kemandirian keuangan daerah yang tertinggi selama periode tahun 2008-2017. Kemudian jika dilihat secara rata-rata selama tahun 2008-2017 *trend* kemandirian keuangan daerah hanya sebesar 262,429 persen dikatakan bahwa kemampuan kemandirian keuangan daerah Kota Bandar Lampung selama periode 2008-2017 mengalami perkembangan yang semakin

baik karena rata-rata *trend* kemandirian keuangan daerah mencapai 100 persen.

Penelitian ini sama hasilnya dengan dengan landasan teori pendapat Abdul Halim yaitu kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain seperti bantuan pemerintah pusat atau pinjaman. Penelitian ini juga sesuai dengan penelitian-penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dori Saputra pada tahun 2014. Dalam penelitian Dori Saputra dimana penelitian tersebut mengukur tentang kemandirian keuangan daerah dari tahun 2004-2011 yang memperoleh rata-rata sebesar 7,6 persen yang menandakan berada pada kategori rendah sekali dengan *trend* kemandirian sebesar 95,3 persen yang menandakan cenderung tidak berkembang dari tahun ke tahun karena persentase kurang dari 100 persen.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Oesi Agustuna pada tahun 2013. Dalam penelitian Oesi Agustuna dimana penelitian tersebut mengukur tentang Kemandirian keuangan daerah dari tahun 2007-2011 yang memperoleh rata-rata sebesar 18,76 persen berada pada kategori rendah. Hal ini juga sejalan dengan penelitian Andry Haryanto pada tahun 2014. Dalam penelitian Andry Haryanto dimana penelitian tersebut mengukur tentang kemandirian keuangan daerah dari tahun 2009-2013 yang memperoleh rata-rata sebesar 48,96 persen yang berada pada kategori rendah dengan *trend* kemandirian keuangan daerah

Kota Medan sebesar 175,54 persen yang berarti mengalami perkembangan karena mencapai 100 persen.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Ririn Dwi Anggraini pada tahun 2015. Dalam penelitian Ririn Dwi Anggraini dimana penelitian tersebut mengukur tentang efektivitas keuangan daerah dari tahun 2010-2014 yang memperoleh rata-rata sebesar 49,26 persen berada pada kategori rendah. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Cherris Enjelita Kaunang, Amran T. Naukoko dan Albert T. Londa pada tahun 2016. Dalam penelitian Cherris Enjelita Kaunang, Amran T. Naukoko dan Albert T. Londa efektivitas dimana penelitian tersebut mengukur tentang efektivitas keuangan daerah dari tahun 2010-2014 yang memperoleh rata-rata sebesar 24,47 persen dikategorikan rendah sekali yang artinya tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat masih tinggi.

Jadi berdasarkan penelitian terdahulu, kemandirian keuangan daerah Kota Bandar Lampung hanya sebesar 27,966 persen lebih kecil dibandingkan dengan kemandirian keuangan daerah di Kota Medan dan Kota Tangerang. sedangkan *trend* kemandirian keuangan daerah Kota Bandar Lampung sebesar 262,429 persen lebih besar dibandingkan dengan *trend* kemandirian keuangan daerah di Kota Medan dan Kabupaten atau Kota di Provinsi Sumatera Barat.

### **3. Kinerja Keuangan Daerah Kota Bandar Lampung Berdasarkan Rasio Desentralisasi Keuangan Daerah**

Rasio desentralisasi keuangan daerah diperoleh dengan membandingkan antara total pendapatan asli daerah dengan total pendapatan daerah. Pada tahun 2008 rasio desentralisasi Kota Bandar Lampung sebesar 9,05 persen berada pada tingkat kemampuan yang sangat kurang. Pada tahun 2009 mengalami kenaikan pada pendapatan asli daerah, pendapatan daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dari tahun sebelumnya tetapi dilihat dari hasil perhitungan rasio desentralisasi keuangan daerah turun menjadi 8,88 persen berada pada tingkat kemampuan yang sangat kurang, akan tetapi terus meningkat dari tahun 2010-2017 yaitu pada tahun 2010 mengalami kenaikan pada pendapatan asli daerah, pendapatan daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sehingga hasil perhitungan rasio desentralisasi sebesar 9,04 persen dikategorikan sangat kurang dan merupakan rasio desentralisasi fiskal keuangan daerah Kota Bandar Lampung terendah selama periode tahun 2008-2017.

Pada tahun 2011 mengalami kenaikan pada pendapatan asli daerah dan pendapatan daerah sehingga hasil perhitungan rasio desentralisasi sebesar 13,71 persen dikategorikan kurang, pada tahun 2012 mengalami kenaikan pada pendapatan asli daerah, pendapatan daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sehingga hasil perhitungan rasio desentralisasi sebesar 20,47 persen dikategorikan kurang, pada tahun 2013 mengalami kenaikan pada pendapatan



asli daerah, pendapatan daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sehingga hasil perhitungan rasio desentralisasi sebesar 21,36 persen dikategorikan sedang, pada tahun 2014 mengalami kenaikan pada pendapatan asli daerah, pendapatan daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sehingga hasil perhitungan rasio desentralisasi sebesar 21,49 persen dikategorikan sedang.

Pada tahun 2015 mengalami kenaikan pada pendapatan asli daerah dan pendapatan daerah sehingga hasil perhitungan rasio desentralisasi sebesar 21,56 persen dikategorikan sedang, pada tahun 2016 sebesar 23,50 persen dikategorikan sedang. Pada tahun 2017 mengalami kenaikan pada pendapatan asli daerah, pendapatan daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sehingga hasil perhitungan rasio desentralisasi sebesar 29,44 dikategorikan sedang dan merupakan rasio desentralisasi fiskal keuangan daerah Kota Bandar Lampung yang tertinggi selama periode tahun 2008-2017. Secara rata-rata kemampuan pemerintah daerah Kota Bandar Lampung dalam menjalankan kewenangan atau tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat masih kurang baik dengan persentase sebesar 17,85 persen.

Kurangnya kontribusi pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan maka kurang juga kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan desentralisasi fiskal. Jumlah pendapatan asli daerah Kota Bandar Lampung dari tahun 2008-2017 memang terus mengalami peningkatan, akan tetapi kontribusi dana berimbang atau dana transferan dari pemerintah pusat

juga mengalami peningkatan sehingga kembali mendominasi penerimaan pendapatan daerah. Yang artinya tingkat ketergantungan pemerintah Kota Bandar Lampung terhadap pemerintah pusat masih sangat tinggi.

Kinerja Kota Bandar Lampung belum maksimal walaupun setiap tahunnya Kota Bandar Lampung mencoba untuk menjadi lebih baik dalam pengelolaannya dan memperbaiki masalah-masalah diberbagai sektor seperti bagaimana memaksimalkan penerimaan pendapatan asli daerah, memaksimalkan penerimaan pendapatan asli daerah, memaksimalkan pengelolaan belanja daerah sehingga semua bisa terpanter karena Kota Bandar Lampung mengarah ke otonomi daerah. Dilihat dari *trend* desentralisasi fiskal keuangan daerah Kota Bandar Lampung selama periode tahun 2008-2017 menunjukan perkembangan yang semakin baik dengan persentase sebesar 197,237 persen dengan tahun dasar yaitu tahun 2008 sebesar 100 persen.

Pada tahun 2009 mengalami penurunan menjadi 98,12 persen sedangkan tahun 2010 sampai tahun 2017 terus mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2010 sebesar 99,89 persen, pada tahun 2011 sebesar 151,49 persen, pada tahun 2012 sebesar 226,19 persen, pada tahun 2013 sebesar 236,02 persen, pada tahun 2014 sebesar 237,46 persen, pada tahun 2015 sebesar 238,23 persen, pada tahun 2016 sebesar 258,67 persen, pada tahun 2017 sebesar 325,30 persen dan merupakan *trend* desentralisasi fiskal yang tertiggi selama periode tahun 2008-2017.

Kemudian jika dilihat secara rata-rata selama tahun 2008-2017 *trend* desentralisasi keuangan daerah hanya sebesar 197,237 persen dikatakan bahwa kemampuan Kota Bandar Lampung selama periode 2008-2017 dalam menjalankan kewenangan atau tanggungjawab yang diberikan pemerintah pusat untuk menggali dan mengelola pendapatan mengalami perkembangan yang semakin baik karena rata-rata *trend* efektivitas keuangan daerah mencapai 100 persen. Penelitian ini sama hasilnya dengan dengan landasan teori yaitu desentralisasi fiskal keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya total pendapatan asli daerah dibandingkan dengan total. Penelitian ini juga sesuai dengan penelitian-penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Andry Haryanto pada tahun 2014.

Dalam penelitian Andry Haryanto dimana penelitian tersebut mengukur tentang desentralisasi fiskal keuangan daerah dari tahun 2009-2013 yang memperoleh rata-rata sebesar 36,80 persen yang berada pada kategori cukup baik dengan *trend* desentralisasi fiskal keuangan daerah Kota Medan sebesar 167,36 persen yang berarti mengalami perkembangan karena mencapai 100 persen. Jadi berdasarkan penelitian terdahulu, desentralisasi fiskal keuangan daerah Kota Bandar Lampung hanya sebesar 17,85 persen lebih kecil dibandingkan dengan desentralisasi fiskal keuangan daerah di Kota Medan sedangkan *trend* desentralisasi fiskal keuangan daerah Kota Bandar Lampung sebesar 197,237 persen lebih besar dibandingkan dengan *trend* kemandirian keuangan daerah di Kota Medan.

#### 4. Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Bandar Lampung Menurut Perspektif Ekonomi Islam

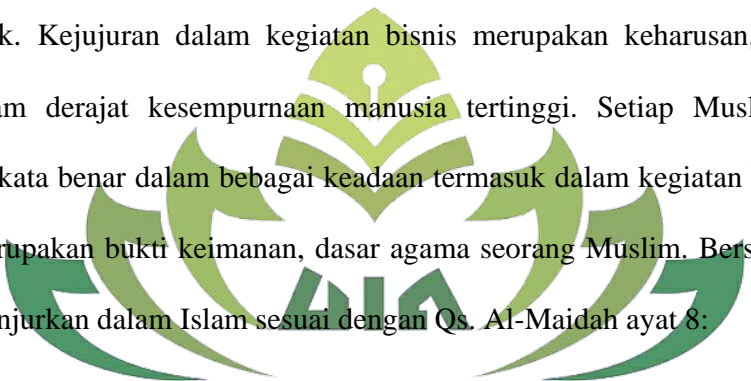
Kinerja adalah segala sesuatu yang dicapai seseorang maupun kelompok organisasi. Islam memandang kinerja dalam Islam adalah bagian dari ibadah dan jihad jika sang pekerja bersikap konsisten terhadap peraturan Allah SWT, suci niatnya dan tidak melupakannya. Dalam pandangan Islam harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang di ajarkan al-Qur'an yaitu yang pertama keadilan. Keadilan dalam penelitian ini ditujukan kepada pemerintah Kota Bandar Lampung dalam pembagian dana atau anggaran yang dimiliki untuk daerah-daerahnya secara adil. Menurut penulis Pemerintah Kota Bandar Lampung sudah adil dalam pembagian dana atau anggaran yang dimiliki untuk daerah-daerahnya sesuai dengan kebutuhan daerah tersebut. Islam memerintahkan kepada setiap manusia untuk berbuat adil atau menegakkan keadilan dalam setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan sesuai dengan QS. An-Nissa ayat 32 :

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا  
اَكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اَكْتَسَبْنَ ۚ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ  
كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

*Artinya : “Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka*

*usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.*

Kedua adalah kejujuran. Kejujuran dalam penelitian ini ditujukan untuk orang-orang yang mengelola keuangan di Kota Bandar Lampung. Jika orang-orang yang mengelola keuangan di Kota Bandar Lampung sudah jujur maka akan menambah pendapatan lebih banyak karena tidak ada yang berbuat curang seperti korupsi serta akan kinerja Kota Bandar Lampung akan semakin baik. Kejujuran dalam kegiatan bisnis merupakan keharusan, menurut ajaran Islam derajat kesempurnaan manusia tertinggi. Setiap Muslim harus selalu berkata benar dalam berbagai keadaan termasuk dalam kegiatan bisnis. Sifat jujur merupakan bukti keimanan, dasar agama seorang Muslim. Bersikap jujur sangat dianjurkan dalam Islam sesuai dengan Qs. Al-Maidah ayat 8:



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

*Artinya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”*

Ketiga yaitu usaha. Usaha dalam penelitian ini adalah usaha untuk mengembangkan pendapatan daerah di Kota Bandar Lampung dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada seperti pajak dan retribusi daerah agar bisa membiayai daerahnya sendiri dan tidak ketergantungan dengan bantuan dari pemerintah pusat atau provinsi serta dapat meningkatkan kinerja keuangan Kota Bandar Lampung sesuai dengan QS. An-Najmayat 39:

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴿٣٩﴾

*Artinya: “Dan bahwa seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya”.*

Keempat adalah inisiatif, inisiatif dalam penelitian ini ditujukan kepada masyarakatnya karena masyarakat juga sangat berperan aktif dalam meningkatkan perekonomian di Kota Bandar Lampung seperti melalui pembayaran pajak. Masih banyak masyarakat sebagai wajib pajak yang belum sadar akan kewajibannya untuk membayar pajak. jika masyarakat sadar dan ikut berpartisipasi dalam membayar pajak daerah maka akan meningkatkan perekonomian Kota Bandar Lampung sesuai dengan QS. Ar-Raad ayat 11:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۚ ... ﴿١١﴾

*Artinya: “...Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri...”.*

Kelima adalah kreativitas. Kreativitas dalam penelitian ini adalah kemampuan untuk menciptakan ide, gagasan, dan berkreasi dalam

memecahkan masalah di Kota Bandar Lampung seperti masih tingginya tingkat ketergantungan Kota Bandar Lampung pada pemerintah pusat, Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam menjalankan kewenangan atau tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat masih kurang baik, dan permasalahan-permasalahan lainnya sesuai dengan QS. Al-Zukhruf ayat 32:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا  
وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ  
رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”.

Manusia mempunyai tujuan hidup yaitu berjuang dijalan kebenaran melawan kebatilan. Misi-misi kebenaran adalah misi kebaikan, kerja sama produktif, dan kasih sayang antar manusia. Sesuai dengan firman allah dalam Qs. Al-kahfi ayat 7 yaitu:

إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لِّهَا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴿٧﴾

Artinya: Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang di bumi sebagai perhiasan baginya, agar kami menguji mereka siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya.

Berdasarkan ayat di atas bahwa Allah akan membalas setiap perbuatan manusia bahkan lebih dari apa yang mereka kerjakan yang artinya jika Pemerintah Kota Bandar Lampung mengerjakan pekerjaan dengan baik dan menunjukkan kinerja yang baik pula bagi pemerintahannya maka akan mendapatkan hasil yang baik pula dari kerjanya dan akan memberikan keuntungan pula bagi pemerintahannya.





## BAB V

### KESIMPULAN

#### A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan terhadap data yang diperoleh dalam penelitian dengan judul “Analisis Tingkat Efektivitas, Kemandirian, dan Desentralisasi Keuangan Daerah Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun 2008-2017)” maka kesimpulan skripsi ini sebagai berikut:

1. Rasio efektivitas keuangan daerah pada pemerintah Kota Bandar Lampung selama periode tahun 2008-2017 hanya pada tahun 2008, 2010, 2011, dan 2012 yang mampu mencapai persentase diatas 100 persen dengan kategori sangat efektif sedangkan 6 tahun lainnya belum mencapai persentase 100 persen. Hal ini dikarenakan belum tercapainya pendapatan asli daerah sesuai dengan target yang telah ditentukan. Secara rata-rata efektivitas keuangan daerah pada pemerintah Kota Bandar Lampung tahun 2008-2017 sudah efektif dengan persentase 90,495 persen dikategorikan efektif berdasarkan kriteria kemampuan efektivitas keuangan daerah. Jika dilihat berdasarkan *trend* rasio efektivitas mengalami kenaikan dan penurunan selama periode tahun 2008-2017 dengan rata-rata 70,814 persen sehingga dapat disimpulkan bahwa pemerintah Kota Bandar Lampung tidak mengalami perkembangan karena rata-rata *trend* efektivitas keuangan daerah tidak mencapai 100 persen.

2. Rasio kemandirian keuangan daerah pada pemerintah Kota Bandar Lampung tahun 2008-2017 mengalami kenaikan secara terus-menerus namun belum menunjukkan kemandirian yang semakin baik karena masih dalam kategori rendah dengan rata-rata sebesar 27,966 persen dikategorikan rendah karena nilai tersebut berada diantara 25-50 persen maka Kota Bandar Lampung dianggap masih sangat ketergantungan terhadap bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi. Pemerintah Kota Bandar Lampung selalu berupaya mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat dan provinsi, hal ini terlihat dari *trend* kemandirian yang mengalami perkembangan selama periode tahun 2008-2018 karena rata-rata *trend* kemandirian keuangan daerah mencapai 100 persen dengan persentase sebesar 262,429 persen.
3. Rasio desentralisasi keuangan daerah pada pemerintah Kota Bandar Lampung selama periode tahun 2008-2017 cenderung mengalami peningkatan. secara rata-rata menunjukkan kemampuan pemerintah Kota Bandar Lampung dalam menjalankan kewenangan atau tanggung jawab yang diberikan oleh pemerintah pusat masih kurang baik yaitu sebesar 17,85 persen dikategorikan kurang berdasarkan kriteria desentralisasi keuangan daerah. *Trend* desentralisasi pemerintah Kota Bandar Lampung menunjukan kecenderungan peningkatan setiap tahunnya dengan rata-rata *trend* 197,237 persen yang artinya pemerintah Kota Bandar Lampung mengalami perkembangan dalam menjalankan kewenangan atau tanggung jawab yang diberikan oleh

pemerintah pusat karena rata-rata *trend* desentralisasi keuangan daerah mencapai 100 persen.

4. Kinerja keuangan pemerintah Kota Bandar Lampung tahun 2008-2017 telah sesuai dengan prinsip Ekonomi Islam yaitu keadilan, kejujuran, usaha, inisiatif dan kreativitas tetapi belum maksimal (masih kurang baik) bila dilihat dari hasil perhitungan kinerja keuangan daerah berdasarkan rasio efektivitas yaitu belum tercapainya realisasi pendapatan asli daerah dengan target yang telah ditentukan dan dilihat dari perkembangan *trend* efektivitas yang masih tidak ada perkembangan selama periode tahun 2008-2017, rasio kemandirian yaitu masih tingginya tingkat ketergantungan Kota Bandar Lampung terhadap pemerintah pusat selama periode tahun 2008-2017 dan rasio desentralisasi fiskal yaitu masih kurangnya kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat untuk menggali dan mengelola pendapatan selama periode tahun 2008-2017.

## **B. Saran**

Berdasarkan data dan informasi yang telah di dapat oleh penulis. Maka penulis hendak memberikan saran-saran kepada pihak-pihak yang terkait dengan tujuan menambah wawasan dan ilmu pengetahuan yaitu:

1. Bagi pemerintah daerah Kota Bandar Lampung:
  - a. Berdasarkan hasil rasio efektivitas dan *trend* efektivitas menunjukkan kemampuan pemerintah Kota Bandar Lampung dalam merealisasikan

PAD dibandingkan dengan target penerimaan sudah efektif tetapi PAD Kota Bandar Lampung masih belum mencapai target yang telah ditentukan serta tidak mengalami perkembangan selama periode tahun 2008-2017 sehingga pemerintah Kota harus lebih mengoptimalkan sumber daya yang ada seperti pajak dan retribusi daerah karena pajak dan retribusi daerah merupakan komponen yang paling utama dan sangat berpengaruh terhadap penerimaan pendapatan daerah sehingga dapat mencapai target penerimaan pendapatan daerah yang sudah ditentukan.

b. Berdasarkan hasil rasio Kemandirian dan *trend* Kemandirian menunjukkan perkembangan selama periode tahun 2008-2017 tetapi tingkat ketergantungan daerah Kota Bandar Lampung terhadap pemerintah pusat atau provinsi masih sangat tinggi sehingga pemerintah Kota Bandar Lampung harus bisa mengurangi bantuan dari pemerintah pusat dan lebih mengandalkan sumber daya yang dimiliki untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang ada serta mengoptimalkan kemampuan para pengelolanya.

c. Berdasarkan hasil rasio desentralisasi dan *trend* desentralisasi menunjukkan perkembangan selama periode tahun 2008-2017 tetapi kemampuan pemerintah Kota Bandar Lampung dalam menjalankan kewenangan atau tanggung jawab yang diberikan oleh pemerintah pusat masih kurang baik sehingga pemerintah Kota Bandar Lampung harus lebih mengoptimalkan kemampuan pemerintahnya yang diberikan

pemerintah pusat dalam menggali dan mengelola pendapatan agar dapat meningkatkan kinerja keuangan Kota Bandar Lampung.

- d. Berdasarkan hasil pembahasan pada bab IV, Pemerintah Kota Bandar Lampung harus lebih mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki dengan proses yang sesuai dengan prinsip-prinsip Ekonomi Islam yaitu keadilan dalam pembagian dana yang dimiliki untuk daerah-daerahnya sesuai dengan kebutuhan, kejujuran dalam mengelola penerimaan keuangan, usaha dalam mengoptimalkan sumberdaya yang dimiliki, inisiatif masyarakat dalam membayar pajak, dan kreativitas untuk memecahkan masalah di Kota Bandar Lampung seperti tingginya tingkat ketergantungan Kota Bandar Lampung pada pemerintah pusat.

2. Bagi peneliti selanjutnya agar dapat melakukan perluasan tempat dan waktu penelitian serta dengan menggunakan alat pengukuran lainnya sebagai alat analisis kinerja keuangan pemerintah daerah.
3. Bagi masyarakat sebagai wajib pajak untuk selalu membayar pajak sehingga dapat meningkatkan penerimaan daerah Kota Bandar Lampung.

## DAFTAR PUSTAKA

- A.R.Kaeng, "Analisis pendapatan asli daerah untuk belanja daerah pada pemerintah kota tomohon". *Jurnal Emba.*, Vol. 3 No. 2 Juni 2015
- Abdul Halim, *Akuntansi Keuangan Daerah*, Jakarta: Salemba Empat, 2008
- , *Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta: UPP-AMP YKPN, 2001
- Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002
- Al-Qur'an dan Terjemah New Cordova, Jawa Barat: PT. SYGMA Examedia Arkanleema, 2012
- Andri Haryanto, Skripsi: "*Analisis Efektivitas, Kemandirian Dan Desentralisasi Pemerintah Kota Medan*", Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2014
- Asep saepul Hamdi, dan E. Bahrudin, *Metode Penelitian Kuantitatif Aplikasi dalam Pendidikan*, Yogyakarta, Deepublish, 2015
- Aswarodi, Analisis Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah Sebelum Dan Setelah Pemberlakuan Undang -Undang No. 25 Tahun 1999 Di Kabupaten Lampung Selatan; Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah. UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2004
- Bisma, I Dewa Gde, Dan Susanto, H. "Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003-2007". *Jurnal Ganec Swara*. Edisi Khusus, Vol 4 No. 3, 2010
- Deddy Supriady Bratakusumah, dan Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001
- Dhimas Angga Permana, dan Ikhsan Budi Riarjo, "Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah Daerah dalam Perspektif Value For Money", *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* , Vol.6 No.5, Mei 2017
- Direktorat jenderal perimbangan keuangan, *Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal Di Indonesia*, Jakarta pusat: Departemen keuangan republic Indonesia, 2009

- Dori Saputra, “*Analisis Kemandirian dan Efektivitas Keuangan Daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat*”, Padang: Universitas Negeri Padang, 2014
- Fajar Nugroho, skripsi: *pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan kinerja keuangan daerah dengan pendapatan asli daerah sebagai variabel intervening: studi kasus diprovinsi jawa tengah*, Semarang: Universitas Diponegoro, 2012
- Humas sekretariat Kota Bandar Lampung, *selang pandang Kota Bandar Lampung*, Bandar Lampung: Pemerintah Kota Bandar Lampung, 2017
- Husein Umar, *Metode riset bisnis*, Jakarta: PT. Gramedia pustaka utama, 2003
- Ima Amaliah, Aan Julia, dan Westi Riani “Pengaruh Nilai Islam Terhadap Kinerja Kerja”. *Jurnal Mimbar*. Vol 29 No. 3, 2013
- Indra Bastian, *Akuntansi Sektor Publik*, Jakarta: ERLANGGA, 2005
- J. Kaloh, *Kepemimpinan Kepala Daerah: Pola Kegiatan, Kekuasaan dan Perilaku Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011
- Makinuddin Dan Tri Hadiyanto Sasongko, *Analisis Social*, Bandung: AKATIGA, 2006
- Maria Regina Tobi dan Farida Idayati, “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Flores Timur”. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. Vol 5 No. 8 agustus , 2016
- Mochamad Fajar Hidayat, Skripsi: “*Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal (Studi Pada Kabupaten dan Kota di Jawa Timur)*”, Malang: Universitas Negeri Brawijaya, Malang, 2013
- Muhammad Zaenuddin, “*evaluasi pelaksanaan otonomi daerah dengan alat analisis derajat otonomi fiskal daerah*”, Malang: Universitas Gajah Mada, 2007
- Ninit Alfianika *Buku ajar metode penelitian pengajaran bahasa Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish, 2016



Novelya South, Jantje Tinangon, Dan Sintje Rondonuwu, “Pengukuran Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Dinas Pengelola Keuangan, Pendapatan Dan Asset (DPKPA) Kabupaten Minahasa Selatan”, *Jurnal EMBA* , Vol.4 No.1, Maret 2016

Pengertian Perspektif (On-Line) Tersedia di : [Http://Kbbi.Web.Id](http://Kbbi.Web.Id) (19 Maret 2017)

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Prof.Drs. C.S.T Kansil, dan Christine S.T Kansil, *System Pemerintahan Inonesia*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002

Rafida. “Analisis Kompetensi Terhadap Kinerja Keuangan di Lembaga Keuangan Mikro Syariah Kota Jambi”. *Jurnal Nalar Fiqh*, Vol 9 No. 1, 2014

Rahardjo Adisasmita, *manajemen pemerintah daerah*, Yogyakarta :Graha Ilmu, 2010

-----, *Pembiayaan Pembangunan Daerah*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011

Reza Marizka, Skripsi: “*Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten dan Kota Disumatera Barat (Tahun 2006-2011)*”, Padang: Universitas Negeri Padang, 2014

Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014

Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005

Sri Soemantri, *Otonomi Daerah*, bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2014

Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif dan kualitatif dan R&G* , Bandung: Alfabet, 2011

-----, *metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabet, 2013

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Pajak Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah (On-Line) tersedia di: [www.Djpk.Kemenkeu.Go.Id](http://www.Djpk.Kemenkeu.Go.Id) (3 Januari 2018).

Undang-Undang Otonomi Daerah, Bandung:Citra Umbara, 2004



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, Jakarta: Perum percetakan Negara RI, 2004

W. Gulo, *Metodelogi penelitian*, Jakarta: Grasindo, 2002

Wempy Banga, *Administrasi Keuangan Negara dan Daerah: Konsep, Teori, dan Fenomena di Era Otonomi Daerah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2017

Wiratna Sujarweni, *Metodelogi penelitian bisnis dan ekonomi*, Yogyakarta : Pustaka baru press, 2015



## LAMPIRAN 5

### Hasil Perhitungan Rasio-Rasio Kinerja Keuangan Daerah Kota Bandar Lampung

#### A. Rasio Efektivitas Keuangan Daerah Kota Bandar Lampung

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100$$

Tahun 2008

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{67.661.519.021,92}{60.422.775.028,70} \times 100 = 111,98\%$$

Tahun 2009

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{70.432.260.003,19}{72.009.309.841,70} \times 100 = 97,81\%$$

Tahun 2010

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{86.692.399.708,41}{75.031.991.782,16} \times 100 = 115,54\%$$

Tahun 2011

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{162.818.119.556,88}{156.796.491.183,50} \times 100 = 103,84\%$$

Tahun 2012

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{298.696.062.085,49}{292.272.049.972,25} \times 100 = 102,20\%$$

Tahun 2013

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{360.698.350.131,88}{418.111.740.815,52} \times 100 = 86,27\%$$

Tahun 2014

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{394.646.889.446,59}{495.200.463.391,26} \times 100 = 79,69\%$$

Tahun 2015

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{397.547.326.856,39}{769.108.142.606,24} \times 100 = 51,69\%$$

Tahun 2016

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{483.379.398.034,84}{757.745.187.987,05} \times 100 = 63,79\%$$

Tahun 2017

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{612.809.680.623,87}{994.795.696.600,00} \times 100 = 92,14\%$$

## **B. *Trend* Efektivitas Keuangan Daerah Kota Bandar Lampung**

$$\text{Trend EKD} = \frac{\text{EKD Tahun Pembanding}}{\text{EKD Tahun Dasar}} \times 100$$

Tahun 2008

$$\text{Trend EKD} = \frac{1,11,98}{1,1198} \times 100 = 100\%$$

Tahun 2009

$$\text{Trend EKD} = \frac{0,9781}{1,1198} \times 100 = 87,35\%$$

Tahun 2010

$$\text{Trend EKD} = \frac{1,1554}{1,1198} \times 100 = 103,18\%$$

Tahun 2011

$$Trend\ EKD = \frac{1,0384}{1,1198} \times 100 = 92,73\%$$

Tahun 2012

$$Trend\ EKD = \frac{1,0220}{1,1198} \times 100 = 91,27\%$$

Tahun 2013

$$Trend\ EKD = \frac{0,8627}{1,1198} \times 100 = 77,04\%$$

Tahun 2014

$$Trend\ EKD = \frac{0,7969}{1,1198} \times 100 = 71,16\%$$

Tahun 2015

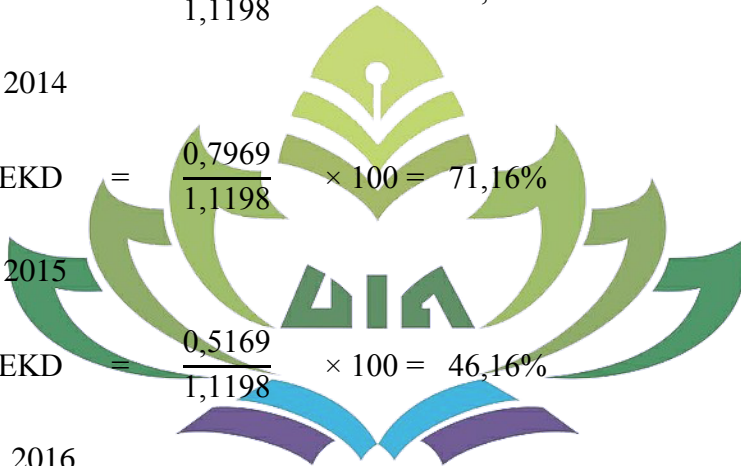
$$Trend\ EKD = \frac{0,5169}{1,1198} \times 100 = 46,16\%$$

Tahun 2016

$$Trend\ EKD = \frac{0,6379}{1,1198} \times 100 = 56,97\%$$

Tahun 2017

$$Trend\ EKD = \frac{0,9214}{1,1198} \times 100 = 82,28\%$$



### C. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kota Bandar Lampung

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat}} \times 100$$

Tahun 2008

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{67.661.519.021,92}{634.760.315.000,46} \times 100 = 10,66\%$$

Tahun 2009

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{70.432.260.003,19}{659.733.381.000,20} \times 100 = 10,68\%$$

Tahun 2010

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{86.692.399.700,41}{672.078.484.000,49} \times 100 = 12,90\%$$

Tahun 2011

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{162.818.119.556,88}{747.009.425.171,00} \times 100 = 21,80\%$$

Tahun 2012

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{298.696.062.085,49}{901.841.182.094,00} \times 100 = 33,12\%$$

Tahun 2013

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{360.698.350.131,88}{992.894.943.895,00} \times 100 = 36,33\%$$

Tahun 2014

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{394.646.889.446,59}{1.039.433.426.630,00} \times 100 = 37,97\%$$

Tahun 2015

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{397.547.326.856,39}{1.016.422.749.268,00} \times 100 = 39,11\%$$

Tahun 2016

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{483.379.398.034,84}{1.376.175.794.387,00} \times 100 = 35,12\%$$

Tahun 2017

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{612.809.680.623,87}{1.456.610.360.061,45} \times 100 = 42,07\%$$

#### **D. *Trend* Kemandirian Keuangan Daerah Kota Bandar Lampung**

$$\text{Trend KKD} = \frac{\text{KKD Tahun Pembanding}}{\text{KKD Tahun Dasar}} \times 100$$

Tahun 2008

$$\text{Trend KKD} = \frac{0,1066}{0,1066} \times 100 = 100\%$$

Tahun 2009

$$\text{Trend KKD} = \frac{0,1068}{0,1066} \times 100 = 100,19\%$$

Tahun 2010

$$\text{Trend KKD} = \frac{0,1290}{0,1066} \times 100 = 121,01\%$$

Tahun 2011

$$\text{Trend KKD} = \frac{0,2180}{0,1066} \times 100 = 204,50\%$$

Tahun 2012

$$\text{Trend KKD} = \frac{0,3312}{0,1066} \times 100 = 310,69\%$$

Tahun 2013

$$Trend\ KKD = \frac{0,3633}{0,1066} \times 100 = 340,81\%$$

Tahun 2014

$$Trend\ KKD = \frac{0,3797}{0,1066} \times 100 = 356,19\%$$

Tahun 2015

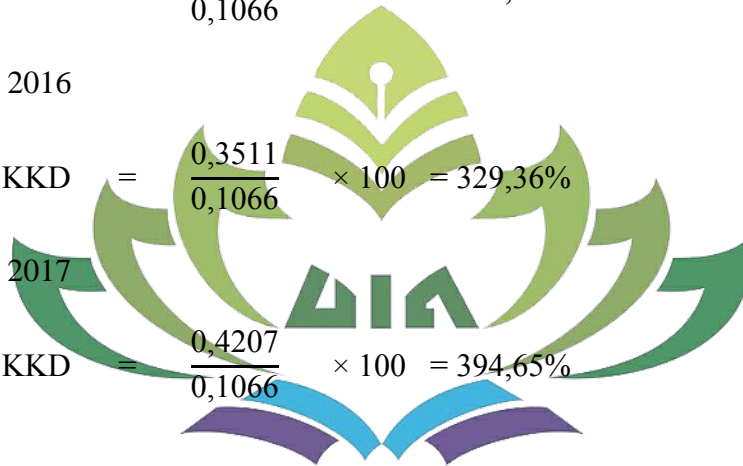
$$Trend\ KKD = \frac{0,3911}{0,1066} \times 100 = 366,89\%$$

Tahun 2016

$$Trend\ KKD = \frac{0,3511}{0,1066} \times 100 = 329,36\%$$

Tahun 2017

$$Trend\ KKD = \frac{0,4207}{0,1066} \times 100 = 394,65\%$$



#### **E. Rasio Desentralisasi Fiskal Keuangan Daerah Kota Bandar Lampung**

$$\text{Rasio Desentralisasi} = \frac{\text{Total Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100$$

Tahun 2008

$$\text{Rasio Desentralisasi} = \frac{67.661.519.021,92}{747.8982.275.000,50} \times 100 = 9,05\%$$

Tahun 2009

$$\text{Rasio Desentralisasi} = \frac{70.432.260.003,19}{793.493.023.000,29} \times 100 = 8,88\%$$

Tahun 2010

$$\text{Rasio Desentralisasi} = \frac{86.692.399.700,41}{959.069.382.000,31} \times 100 = 9,04\%$$

Tahun 2011

$$\text{Rasio Desentralisasi} = \frac{162.818.119.556,88}{1.187.871.504.156,20} \times 100 = 13,71\%$$

Tahun 2012

$$\text{Rasio Desentralisasi} = \frac{298.696.062.085,49}{1.459.471.856.318,18} \times 100 = 20,47\%$$

Tahun 2013

$$\text{Rasio Desentralisasi} = \frac{360.698.350.131,88}{1.688.412.290.739,88} \times 100 = 21,36\%$$

Tahun 2014

$$\text{Rasio Desentralisasi} = \frac{394.646.889.446,59}{1.836.004.647.114,59} \times 100 = 21,49\%$$

Tahun 2015

$$\text{Rasio Desentralisasi} = \frac{397.547.326.856,39}{1.843.540.674.593,39} \times 100 = 21,56\%$$

Tahun 2016

$$\text{Rasio Desentralisasi} = \frac{483.379.398.034,84}{2.057.086.652.010,39} \times 100 = 23,50\%$$

Tahun 2017

$$\text{Rasio Desentralisasi} = \frac{612.809.680.623,87}{2.081.420.040.685,32} \times 100 = 29,44\%$$



#### F. *Trend Desentralisasi Fiskal Keuangan Daerah Kota Bandar Lampung*

$$Trend\ DKD = \frac{DKD\ Tahun\ Pembanding}{DKD\ Tahun\ Dasar} \times 100$$

Tahun 2008

$$Trend\ DKD = \frac{0,0905}{0,0905} \times 100 = 100\%$$

Tahun 2009

$$Trend\ DKD = \frac{0,0888}{0,0905} \times 100 = 98,12\%$$

Tahun 2010

$$Trend\ DKD = \frac{0,0904}{0,0905} \times 100 = 99,89\%$$

Tahun 2011

$$Trend\ DKD = \frac{0,1371}{0,0905} \times 100 = 151,49\%$$

Tahun 2012

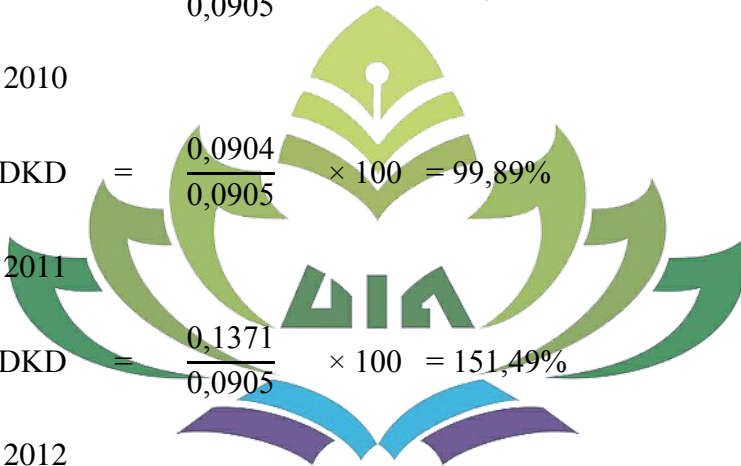
$$Trend\ DKD = \frac{0,2047}{0,0905} \times 100 = 226,19\%$$

Tahun 2013

$$Trend\ DKD = \frac{0,2136}{0,0905} \times 100 = 236,02\%$$

Tahun 2014

$$Trend\ DKD = \frac{0,2149}{0,0905} \times 100 = 237,46\%$$



Tahun 2015

$$\text{Trend DKD} = \frac{0,2156}{0,0905} \times 100 = 238,23\%$$

Tahun 2016

$$\text{Trend DKD} = \frac{0,2350}{0,0905} \times 100 = 259,67\%$$

Tahun 2017

$$\text{Trend DKD} = \frac{0,2944}{0,0905} \times 100 = 325,30\%$$

